

SKRIPSI

DINAMIKA KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH AMERIKA SERIKAT



MUHAMMAD ZAINAL

1510523001

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2019

SKRIPSI

DINAMIKA KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH AMERIKA SERIKAT



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional

MUHAMMAD ZAINAL

1510523001

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2019

SKRIPSI

DINAMIKA KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH AMERIKA SERIKAT

Disusun dan di ajukan oleh

MUHAMMAD ZAINAL

1510523001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 19 Agustus 2019

Pembimbing



Andi Meganingratna, S.IP.,M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial



Universitas Fajar
UNIFA
PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS FAJAR
Andi Meganingratna, S.IP.,M.Si

SKRIPSI

DINAMIKA KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH AMERIKA SERIKAT

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ZAINAL

1510523001

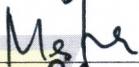
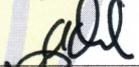
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal **14 September 2019** dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Achmad, S.IP., M.Si	Ketua	
2.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si	Sekretaris	
3.	Adelita Lubis, S.Sos., MA	Anggota	
4.	Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR




Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zainal

Nim : 1510523001

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **DINAMIKA KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 23 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zainal

PRAKATA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “DINAMIKA KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH AMERIKA SERIKAT” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat serta membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan mempermudah urusan penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, ayahanda Abu Bakar dan Ibunda tersayang Junaeda serta Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa terbaik kepada penulis.
3. Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu, menyadarkan penulis untuk senantiasa bersabar untuk menghargai arti sebuah proses, serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Yang mana telah memberikan ilmunya selama ini.
5. Seluruh teman-teman keluarga besar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, serta seperjuangan skripsi yang saling menyemangati satu sama lain. Terima kasih banyak untuk semua pengalaman baiknya.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dan kekurangan dalam Skripsi ini, itu semua karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, kembali lagi ke sebuah frasa bahwa 'Kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Sempurna', maka penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tulisan ini terdapat banyak kesalahan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa semangat dan cinta dari orang-orang yang paling berharga dan bersejarah dalam hidup saya yang mampu merangkai dan membuat deretan huruf dalam skripsi ini tersusun sedemikian bentuk. Semoga tulisan ini berguna sebagai bahan referensi untuk instansi terkait dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian dalam bidang serupa dengan judul tulisan ini.

Makassar, 07 September 2019

**Muhammad Zainal
Penulis**

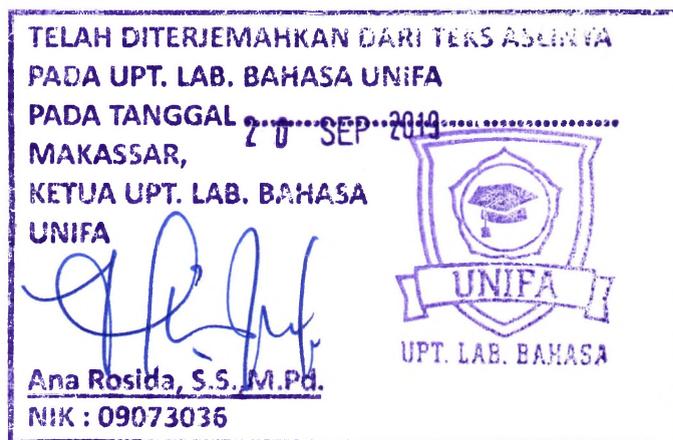
ABSTRACT

THE DYNAMICS OF SISTER CITY COOPERATION BETWEEN BANDUNG CITY OF INDONESIA AND FORT WORTH CITY OF USA

Muhammad Zainal
Andi Meganingratna

The emergence of new actors in international relations has triggered more specific cooperation to develop local government. Cooperation between the government or twin cities is a current phenomenon that often encountered. Bandung city is one of the cities that is active in the implementation of international cooperation of local governments. One of the local governments that have Sister City collaboration with Bandung is Fort Worth, Texas, United States of America and has been established since 1990. This study aims to explain the dynamics of Sister City cooperation between Bandung city and Fort Worth city. In addition, the method used by the author is a qualitative method using primary data from interviews with one of the staff of the sub-department of foreign cooperation/ the National Unity and Politics Agency in Bandung, and using secondary data such as books, journals, news articles and sources other relevant literature. The concept for analysing this case in this study is paradiplomacy and Sister City. The results of this study indicate that there is a dynamic of Sister City cooperation between Bandung city and Fort Worth city, which is characterized by budgetary issues and distances that are obstacles in the implementation of any good cooperation agenda that has been carried out as is being planned such as the ILA (International Leadership Academy) program. The ILA students did not run very smoothly and the economic crisis they both faced was in terms of the transparency of the implementation of Sister City cooperation.

Keywords: Bandung City, Fort Worth City, Sister City, Paradiplomacy.



ABSTRAK

DINAMIKA KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH AMERIKA SERIKAT

Muhammad Zainal

Andi Meganingratna

Munculnya aktor baru dalam hubungan internasional memicu kerja sama yang lebih spesifik untuk membangun pemerintah daerah. Kerjasama antara pemerintah atau kota kembar adalah fenomena yang sekarang sering dijumpai. Kota Bandung adalah salah satu kota yang aktif dalam implementasi kerjasama internasional pemerintah daerah. Salah satu pemerintah daerah yang memiliki kerjasama *Sister City* dengan Bandung adalah Fort Worth, Texas, Amerika Serikat dan telah berdiri sejak 1990. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth. Selain itu, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dari wawancara dengan salah satu staf sub bagian kerja sama luar negeri/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung serta menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, artikel berita dan sumber-sumber sastra lain yang relevan. Konsep untuk menganalisis kasus ini dalam penelitian ini adalah paradiplomasi dan *Sister City*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dinamika kerjasama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth yang ditandai dengan masalah anggaran serta jarak yang menjadi kendala dalam pelaksanaan setiap agenda kerja sama baik yang telah dilakukan begitupun yang sedang direncanakan seperti program ILA (*International Leadership Academy*) kunjungan siswa-siswi ILA tidak terlalu berjalan dengan lancar serta krisis ekonomi yang pernah dihadapi keduanya begitupun dari sisi transparansi pelaksanaan kerja sama *Sister City*.

Kata Kunci: Kota Bandung, Kota Fort Worth, *Sister City*, Paradiplomasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
a. Kegunaan Teoritis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori dan Konsep.....	8
a. Paradiplomasi	9
b. <i>Sister City</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Rancangan Penelitian	26
B. Kehadiran Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29

F. Analisis Data.....	29
G. Pengecekan Validitas Temuan	30
H. Tahap - Tahap Penelitian.....	31
BAB IV PEMBAHASAN	36
4.1 Kondisi Geografis Kota Bandung dan Kota Fort Worth	36
4.1.1 Kota Bandung	36
4.1.2 Kota Fort Worth.....	38
4.2 Latar Belakang Kerja Sama <i>Sister City</i> Antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth.....	40
a. Kerja Sama PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Helicopter Bell	40
b. Pengembangan Sumber Daya Melalui Pertukaran Pelajar dan Pelatihan Bagi Pelayanan Masyarakat	54
4.3 Bentuk Kerja Sama <i>Sister City</i> Antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth	61
4.4 Dinamika Kerja Sama <i>Sister City</i> Antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth	66
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
LAMPIRAN	80
a. <i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i>	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional mulai mengalami transformasi terkait dengan aktor yang terlibat yang disebabkan oleh fenomena globalisasi. Jika kita melihat ke dalam unit analisis negara, bukan lagi hanya pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam menjalin hubungan kerja sama internasional. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional secara khusus sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat perwilayah di suatu negara yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri melainkan terdapat penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat dalam menjalin kerja sama internasional kepada pemerintah daerah.¹

Pola interaksi hubungan internasional dalam era globalisasi yang berupaya menjadikan dunia lebih terintegrasi antara satu dengan yang lainnya menjadi awal mula munculnya pemerintahan daerah sebagai pelaksana interaksi internasional. Kehadiran pemerintah daerah merupakan salah satu aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah daerah/lokal diberbagai negara didunia dimana satu sama lain saling berhubungan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus tetap melaporkan inisiasi bentuk kerja sama internasional yang akan dilakukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada Departemen Luar Negeri serta instansi terkait agar koordinasi antar

¹Jan Aart Scholte, *Globalization: A Critical Introduction* (New York: Palgrave, 2000) Halaman 133-157.

lembaga dalam pemeritahan di suatu negara tetap sejalan dengan kepentingan nasional yang diperjuangkan serta mendapatkan pertimbangan.²

Sister City merupakan salah satu kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah kota atau provinsi dikarenakan adanya hubungan diplomatik antar negara serta persamaan antara kedua kota atau provinsi yang merupakan dasar utama dari sebuah kerja sama *Sister City*, baik keadaan geografis, budaya maupun aktivitas kota. Di Indonesia, hubungan kerja sama *Sister City* semakin terfokus dan terjalin dengan baik ketika dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014. UU tersebut memberikan gerak dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya dalam hubungan kerja sama internasional. Pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Diantara faktor-faktor yang mampu berpengaruh pada keberhasilan sebuah kerja sama *Sister City* salah satunya yaitu adanya kondisi saling melengkapi antara kedua pihak dalam bidang kerja sama yang dilakukan baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata dan lain-lain sehingga dapat mendorong

² https://pih.kemlu.go.id/files/Permenlu_09-A-KP-XII-2006-01.pdf.diakses pada tanggal 02 Juli 2019.

³ <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>.diakses pada tanggal 16 mei 2019.

terjadinya aliran barang dan jasa, pertukaran kunjungan pejabat, pengusaha dan misi-misi lainnya dari kedua negara.⁴

Salah satu kota yang paling pertama mengadakan kerja sama antar kota bahkan jauh sebelum UU tentang kerja sama *Sister City* di revisi. Kota Bandung telah lebih dulu melakukan hubungan kerja sama dengan kota Braunschweig, Niedersachsen, Jerman pada tahun 1960. Kerja sama ini dilakukan karena pemerintah kota menganggap bahwa kerja sama *Sister City* dapat memberikan dampak positif yang membuat kota Bandung lebih berkembang. Atas dasar itulah sehingga kota Bandung mengembangkan bidang kerja samanya dengan kota lain yakni kota Fort Worth, Texas, Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1990.⁵ Berawal dari saran Prof. DR. Ing. BJ. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi menginginkan agar kota Bandung dapat membangun kerja sama *Sister City* dengan kota Fort Worth, Texas Amerika Serikat mengingat hubungan antar kedua kota ini yang sudah menjalin hubungan kerja sama yang cukup lama melalui kerja sama teknologi kedirgantaraan.⁶

Kerja sama mitra kota ini dilatarbelakangi oleh adanya kerja sama IPTN dengan pabrik pesawat terbang Helicopter Bell yang berada di kota Fort Worth. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* mitra kota antara kota Bandung dengan kota Fort Worth dilaksanakan di kota Fort Worth pada tanggal 2 April 1990 oleh wali kota Bandung Ateng Wahyudi dan wali kota Fort Worth Bob Bolen.⁷

⁴ Permendagri No. 193/165/PUOD, Jakarta 26 april 1993. (dalam buku: Sidik Jatmika, Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional), Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001 hal. 108.

⁵ <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>. diakses pada tanggal 16 mei 2019.

⁶ <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>. diakses pada tanggal 16 mei 2019.

⁷ <http://unfari.ac.id/assets/file/0296873acbbd7deda8b629c03fea1ce5.pdf>. diakses pada tanggal 16 mei 2019.

Terjalannya kerja sama antara IPTN yang berganti nama menjadi PT. Dirgantara Indonesias, dengan PT. Helicopter Bell bertujuan untuk menjadikan PT Dirgantara Indonesia sebagai perusahaan yang berkelas dunia dalam industri ke-dirgantaraan yang berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global.⁸

Fort Worth yang dikenal sebagai salah satu kota di Amerika Serikat yang memiliki industri pesawat terbang yang cukup besar di negaranya serta negara Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara superpower yang memiliki teknologi canggih dan mutakhir. Sehingga dengan melakukan kerja sama dengan negara yang memiliki kemajuan teknologi dapat bermanfaat bagi Indonesia yang saat itu sedang mengembangkan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.⁹

Diawali dari sejarah kerja sama yang dilakukan antara PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Helicopter Bell mendapat apresiasi dari pemerintah dan menganggap kerja sama ini perlu untuk dilakukan pengembangan perluasan kerja sama dalam bidang lainnya. Kemudian adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa undang-undang otonomi daerah, menjadikan pemerintah kota Bandung dapat melaksanakan praktik paradiplomasi yang mengacu pada kepentingan kota Bandung dengan *Sister City* nya. Pemberian kewenangan atau otonomi daerah kepada pemerintah daerah dalam kerja sama internasional sudah diatur dalam Undang-Undang sejak tahun 1999 yang memberikan pengaruh kepada pemerintah kota Bandung dalam melaksanakan kerja sama *Sister City*. Pada

⁸Sejarah PT. Dirgantara Indonesia. pdf. elib.unikom.ac.id/download.php?id=129957, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

⁹DirgantaraIndonesianaCompanyProfile.<https://www.indonesianaerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=company>. Di akses pada tanggal 27 juli 2019.

tahun 1990, kota Bandung melaksanakan kerja sama *Sister City* dengan kota Fort Worth.¹⁰

Di Indonesia, pelaksanaan hubungan kerja sama oleh pemerintah daerah atau paradiplomasi di Indonesia baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam kategori yang melibatkan berbagai bidang dalam kerja sama atau serbaguna yang juga mengacu pada model kerja sama luar negeri atau kerja sama desentralisasi. Kerja sama luar negeri ini melibatkan bidang-bidang seperti ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, alih teknologi dsb. Kerja sama *Sister City* juga merupakan kerja sama yang memberikan keuntungan tidak hanya secara ekonomi tetapi juga non ekonomi.¹¹ Kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth yang diketahui bahwa kota Bandung memiliki kepentingan dalam transfer ilmu antara kedua kota baik dalam bidang pendidikan maupun pelatihan bagi tenaga kerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan kerja sama *Sister City* pemerintah melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 193/2653/PUOD/1993 yakni adanya ilmu dan teknologi yang dapat dialihkan.

Kerja sama yang dilakukan oleh kedua kota berlandaskan pada potensi yang dimiliki dalam bidang Pengembangan Teknologi Pesawat Terbang. Kemudian dalam meningkatkan potensi yang dimiliki oleh kedua kota, pemerintah kota berinisiatif untuk menjalin kerja sama yang pada awalnya tercantum dalam bentuk piagam persahabatan yang berorientasi pada upaya menumbuh kembangkan hubungan persahabatan kemudian diimplementasikan ke arah bentuk kerja sama

¹⁰<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>.diakses pada tanggal 16 mei 2019.

¹¹Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy : Kerja Sama Luar Negeri oleh PEMDA di Indonesia*, (Yogyakarta ; The Phinis Press Yogyakarta, 2013),hlm.2

yang lebih konkret dan saling menguntungkan melalui model kerja sama *Sister City*.¹²

1.2 Fokus penelitian dan Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini, agar pembahasan tidak terlalu melebar maka peneliti hanya akan fokus untuk membahas tentang Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung Indonesia dengan Kota Fort Worth Amerika Serikat, maka dari itu peneliti mengangkat rumusan masalah:

1. Bagaimana Bentuk Kerja sama *Sister City* Antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth?
2. Bagaimana Dinamika Kerja sama *Sister City* Antara Kota Bandung Indonesia dengan Kota Fort Worth?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat menjelaskan secara singkat mengenai tujuan penelitian ini. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth Amerika Serikat.
2. Untuk Mengetahui Dinamika Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung Indonesia dengan Kota Fort Worth Amerika Serikat.

¹²<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>.di akses pada tanggal 05 mei 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Signifikansi penelitian ini bagi ilmu pengetahuan yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peminat dan peneliti masalah hubungan internasional, seperti misalnya dalam menerapkan konsep Paradiplomasi dan konsep *Sister City* dalam mewujudkan bentuk kerja sama *Sister City* antar daerah yang berdeda negara sebagaimana kerja sama yang dilakukan antara kota Bandung dengan kota Fort Worth. Selain itu penelitian ini juga dapat melihat bentuk kerja sama yang dilakukan dari pelaksanaan kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh kota Bandung dengan kota Fort Worht sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi *stake holder* yang berkaitan dengan masalah kerja sama *Sister City*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Penelitian ini membahas tentang kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth, dimana penulis akan meninjau beberapa sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep Paradiplomasi yang dianggap sebagai salah satu konsep yang dapat mengantarkan penulis dalam menguraikan hasil penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini. Konsep Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub state*, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah Paradiplomasi pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* menjadi *paradiplomacy*, yang mengacu pada makna kebijakan luar negeri non pusat.¹

Penggunaan konsep Paradiplomasi dalam penelitian ini dianggap sejalan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai kerja sama *Sister City*, yang melibatkan peran pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas internasional dalam bentuk kerja sama dalam berbagai bidang serta mendapatkan

¹Criekemans, David, 'Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?', hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium, July 2008.

dukungan dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam penggunaan konsep Paradiplomasi dalam penelitian ini juga dirangkaikan dengan konsep *Sister City* yang sejalan dengan tema yang sedang dibahas dalam tulisan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa *Sister City* dalam pengertiannya bisa disebut juga sebagai kota kembar, dimana kerja sama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.² Dengan demikian *Sister City* hanya dapat diterapkan oleh dua di antara pemerintah kota atau daerah di kedua belah pihak dan terkadang didukung oleh NGO, lembaga-lembaga non-profit, bahkan komunitas internasional, disamping itu kerja sama antar kota bersifat luas baik mencakup kerja sama ekonomi, pembangunan, pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan kebudayaan yang kemudian disetujui secara formal melalui penandatanganan di kedua belah pihak.³ Adanya konsep Paradiplomasi yang dirangkaikan dengan konsep *Sister City* ini membuat pemerintah kota Bandung tentunya lebih leluasa dalam melakukan aktivitas kerja sama internasional dalam berbagai bidang dan adanya payung hukum serta dukungan dari pemerintah pusat.

1.1.2 Paradiplomasi

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah Paradiplomasi pertama kali diluncurkan pada tahun 1980 an oleh ilmuan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomacy*' menjadi '*Paradiplomacy*'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna '*the foreign policy of non central*

² Andi Oetomo, *apa itu sister city ?* (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pembangunan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan

³ <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>.di akses pada tanggal 03 mei 2019.

governments'. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah *microdiplomacy*. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub state*, pemerintah lokal/regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.

Dalam era tanpa tapal batas ini maka tentunya keberadaan Paradiplomasi menjadi fenomena yang kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non negara dalam arena hubungan internasional. Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerja sama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi negara, dalam hal ini, Paradiplomasi telah merangsang geliat lokal dalam terwujudnya peran serta daerah dalam interaksi global.⁴

Selain itu Ivo Duchacek juga membagi Paradiplomasi menjadi tiga tipe Paradiplomasi.⁵ Tipe pertama adalah *Transborder Paradiplomacy*. *Transborder Paradiplomacy* ini merujuk pada hubungan institusional, baik formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Kerja sama ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah di antara mereka. Tipe kedua adalah *Transregional Paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun negara di

⁴Takdir Ali, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, (Yogyakarta: 2013) hlm.38.

⁵Kurniawan Ariadi, "*Paradiplomasi dalam Politik Luar Negeri Indonesia*", <https://godedeahead.wordpress.com/2009/12/16/paradiplomasi-dalam-politik-luarnegeri-indonesia/>. diakses 23 Agustus 2013.

mana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berbatasan langsung dalam satu kawasan. Tipe yang ketiga adalah *Global Paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Tiga bentuk paradiplomasi ini sangat mungkin berkembang dan memberi kontribusi dan melengkapi pada kinerja diplomasi pemerintah pusat.

Konsep Paradiplomasi pada dasarnya adalah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Tujuannya beragam, seperti:⁶

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor sub nasional dalam diplomasi.
2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor sub nasional.
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam keselarasan.
4. Memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah, dalam berbagai bentuknya.

Penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh aktor sub nasional seperti pemerintah daerah/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan hubungan luar negeri, terutama dalam bentuk-bentuk kerja sama internasional, pembangunan daerah merupakan hal terpenting dari adanya penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,

⁶ *Ibid.*

meningkatkan pola pelayanan birokrasi, dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar masyarakat melalui jalur Paradiplomasi.

Paradiplomasi merujuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh entitas sub negara (daerah) di arena internasional untuk tujuan tertentu.⁷ Paradiplomasi yang melibatkan daerah dalam urusan internasional dilakukan dengan aktif dalam urusan internasional dengan beragam cara, seperti membuka kontak perdagangan dan misi budaya ke luar negeri, mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan negara-negara asing maupun aktor internasional non negara, serta berpartisipasi dalam jaringan kerja sama internasional.⁸

Kehadiran Paradiplomasi dianggap dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan sejumlah pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi yang diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih optimal bagi kepentingan nasional. Konsep diplomasi tradisional yang merupakan ranah milik pemerintah pusat telah mengalami pergeseran dengan masuknya berbagai aktor baru, diantaranya pemerintah daerah. Sebagai aktor internasional, pemerintah daerah dapat berperan penting dalam hubungan internasional. Peran pemerintah daerah dalam politik luar negeri ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam kebijakan luar negeri, terlepas dari seberapa besar otonomi

⁷Stefan Wolff, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf. diakses 23 Agustus 2019.

⁸ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, London:Routledge, 2015, h.1-21.

yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah pusat tetap menjadi pengontrol partisipasi daerah di arena internasional.

Sementara menurut Barros dalam wolf, yang mendefinisikan bahwa Paradiplomasi adalah alat penting untuk menegaskan kembali gagasan sebuah proyek nasional yang mencari pembangunan yang lebih besar dan otonomi lebih besar bagi sub unit nya. Dalam konteks ini, pentingnya kerangka kelembagaan dan hukum yang ada pada pemerintah yang menjadi aktor sub nasional untuk membangun daerahnya tanpa berpangku tangan terhadap kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi sesuai dengan aturan dan hukum nasional yang berlaku, sehingga menciptakan sinergi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.⁹

Selain itu Rino Adibowo dan Sylvia Octa Putri dalam jurnal yang berjudul *Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung*, menuliskan bahwa Paradiplomasi merupakan pengembangan dari adanya hubungan luar negeri secara langsung yang dilakukan oleh aktor sub nasional, yang mempunyai tujuan tertentu dalam berbagai bidang yang ditujukan untuk kesejahteraan daerah yang dinaungi pemerintah sub nasional tersebut dibawah pengawasan pemerintah nasional dalam rangka menghadapi globalisasi. Sementara itu di Indonesia perkembangan konsep Paradiplomasi masih minim terutama karena kebijakan luar negeri masih merupakan ranah kekuasaan pemerintah pusat. Namun, kecenderungan kehidupan modern memerlukan cara berpikir yang baru dimana

⁹ Wolf, Steffan, '*Paradiplomacy : Scope, Opportunities and Challenges*' hal. 1, 13. University of Nottingham, 2009 diakses dari <http://stefanwolff.com/publications/paradiplomacy/> pada tanggal 07 Agustus 2019.

perkembangan hubungan internasional dan politik nasional koheren dengan proses desentralisasi. Akibatnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam arena internasional adalah suatu keniscayaan untuk menjalin hubungan kerja sama internasional.¹⁰ Kemudian dalam jurnal yang sama dikatakan bahwa Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub nasional, institusi politik dan kebijakan publik suatu pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik.¹¹ Berkenaan dengan kewenangan yang di berikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kondisi aktivitas yang sedang dilakukan oleh Indonesia khususnya kota Bandung dalam mengimplementasikan kerja samanya dengan mitra kerja sama yang ada di luar negeri.

Menurut Andre dalam jurnal yang berjudul *“Lessons from the Developed World”* bahwa Paradiplomasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah sub negara berkembang bahwa masyarakat dapat memiliki banyak fokus yang berbeda. Tidak semua pemerintah daerah telah mendekati hubungan internasional dengan cara yang sama. Ada tiga lapisan paradiplomasi yaitu lapisan pertama berkaitan dengan isu-isu ekonomi. Dalam konteks ini, sub negara pemerintah bertujuan membangun keberadaan internasional untuk tujuan menarik investasi asing, memikat perusahaan-perusahaan internasional ke wilayah tersebut, dan penargetan pasar baru untuk ekspor. Lapisan kedua dari Paradiplomasi melibatkan kerja sama (budaya,

¹⁰ Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri. 2016. Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, (Online), Volume VI No. 2, (<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/325/293>, diakses 20 Agustus 2019).

¹¹ *Ibid.*

pendidikan, teknis, teknologi dan lainnya). Lapisan ketiga Paradiplomasi melibatkan pertimbangan politik.¹² Sejalan dengan Paradiplomasi yang di utarakan oleh Andre, di Indonesia hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup kepentingan banyak hal untuk pengembangan kualitas potensi daerah. Perluasan bidang kerja sama yang dilakukanpun bervariasi, mulai dari Ekonomi, Politik, Teknologi, Pendidikan, Pariwisata, hingga keberbagai sub bidang kerja sama lainnya yang dianggap potensial dalam pengembangan potensi daerah.

Berbicara mengenai Paradiplomasi, sebelumnya sudah pernah di teliti oleh Takdir Ali Mukti dalam jurnal yang berjudul "*Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora*" dikatakan bahwa praktek Paradiplomasi yang sudah cukup lama dilaksanakan oleh beberapa negara maju yang ada di dunia. Paradiplomasi merupakan bagian dari kelanjutan sejarah integrasi di suatu negara yang melakukan kerja sama internasional. Paradiplomasi yang di lakukan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni, pertama, hubungan dan kerja sama pemerintah regional atau *sub states* yang hanya berorientasi untuk tujuan-tujuan ekonomi semata seperti perluasan pasar, pengembangan investasi ke luar negeri, dan investasi secara timbal balik. Hubungan ini sama sekali tidak melibatkan motif-motif yang kompleks, misalnya politik atau budaya. Kedua, Paradiplomasi yang melibatkan berbagai bidang dalam kerja sama atau *multipurposes*, antara ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan alih teknologi dan sebagainya. Konsep hubungan ini mengacu pada model kerja sama luar negeri yang terdesentralisasi. Kategori ketiga adalah, Paradiplomasi

¹² Andre Lecours, 2008. Discussion papers Political Issues of Paradiplomacy : *Lessons from the Developed World*. (Online) (<https://www.worldcat.org/title/political-issues-of-paradiplomacy-lessons-from-the-developed-world/oclc/298177960>).diakses 21 Agustus 2019).

kompleks yang melibatkan motif-motif politik dan identitas nasionalis wilayah yang spesifik. Mereka berusaha menjalin hubungan internasional dengan semangat yang sangat besar untuk mengekspresikan identitas nasional wilayah mereka yang spesifik dan otonom yang berbeda dengan sebagian besar wilayah di negara mereka.¹³ Konsep Paradiplomasi tersebut sejalan dengan Paradiplomasi yang diterapkan di Indonesia sebagaimana kota Bandung menjalin kerja sama *Sister City* dengan kota Fort Worth yang disertai tekad dan keinginan yang kuat dalam mengekspresikan identitas mereka melalui bentuk perluasan kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan dalam mengembangkan potensi kerja sama yang berkelanjutan meski dari sisi letak geografis berbeda namun tidak menyulitkan kedua negara ini untuk merepresentasikan keinginannya untuk menjalin sebuah kerja sama.

Untuk menjamin suksesnya paradiplomasi, pemerintah daerah memerlukan pemahaman mengenai kekuatan yang akan melengkapi kemitraan antara pemerintah daerahnya dengan pemerintah daerah dari negara lain dan bagaimana hal ini dapat tercapai. Pertama, daerah yang akan melakukan kerja sama memiliki tingkat pembangunan yang sama, atau paling tidak memiliki kebutuhan yang dapat saling melengkapi, memiliki keahlian dan sumber daya.¹⁴ Kedua, adanya kelembagaan, yaitu adanya unsur dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai penghubung dan penengah yang akan menjembatani dan mengumpulkan berbagai kepentingan yang

¹³ Takdir Ali Mukti. 2015. Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, (Online), Volume 1, Number 1, (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/viewFile/136/pdf>.diakses 21 Agustus 2019).

¹⁴Michael Keating, Paradiplomacy and Regional Networking, www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-eu-keating.pdf, diakses 23 Agustus 2019.

ada di wilayah tersebut. Ketiga, daerah yang akan bekerja sama memiliki struktur, kewenangan dan kekuatan yang serupa. Faktor-faktor tersebut diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan, misalnya salah satu daerah memiliki kewenangan legislatif, administratif dan keuangan yang tinggi sementara daerah yang akan diajak bekerja sama hanya memiliki status kota tanpa kewenangan tinggi.¹⁵

Paradiplomasi diyakini telah menjadi tuntutan kebutuhan daerah saat ini dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan potensi daerah. Arus informasi, pergerakan modal dan migrasi manusia, membuat daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak akan mampu mengelakkan diri dari pengaruh internasional sekaligus berhadapan dengan berbagai kesempatan mendapatkan sesuatu yang positif bagi kepentingan daerah sekaligus kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu ada konsep baru dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia dimana kemampuan daerah kabupaten/kota harus diperkuat dalam pelaksanaan diplomasi.¹⁶ Tanggung jawab pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan oleh pemerintah, tentunya tidak hanya terletak di tangan pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai salah satu *non state actor* dalam hubungan internasional memanfaatkan Paradiplomasi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bahan paparan Sekretariat Daerah Kota Bandung Pada kunker Komisi I pada tanggal 13 November 2014.

pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, baik yang berupa kerja sama pemanfaatan potensi alam maupun peningkatan kualitas manusia. Kerja sama ini dilakukan agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan pembangunan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah daerah berupaya membuka kontak perdagangan dan misi budaya ke luar negeri, mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan negara-negara asing maupun aktor internasional non negara, berpartisipasi dalam jaringan kerja sama internasional.

Paradiplomasi yang paling populer di Indonesia adalah kerja sama *Sister City/Sister Province*. Konsep ini merupakan hubungan kerja sama kemitraan antara dua kota atau dua provinsi dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Permendagri No. 1 tahun 1992 menyebutkan bahwa kerja sama *Sister City* adalah hubungan kerja sama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota administratif dengan pemerintah kota setingkat di luar negeri. Dalam perkembangannya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kerja sama model tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, persyaratan ini meliputi persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan NKRI,

mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung keutamaan gender dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Bagi negara-negara berkembang kerja sama *Sister City/Sister Province* diharapkan dapat menjadi jembatan bagi terbentuknya pemahaman antar kebudayaan serta transfer teknologi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Kemitraan bilateral tersebut diharapkan menjadi proses kerja sama alih teknologi dan informasi, bantuan pendanaan, peningkatan SDM untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Hal ini dapat menjadi langkah efektif sepanjang kerja sama tersebut memiliki program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerja samakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerja samakan. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama atas potensi unggulan yang dapat dikerja samakan.

1.1.3 *Sister City*

Konsep *Sister City* pertama kali digunakan di Benua Eropa, yaitu antara kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan kota Poix Du Nord, Perancis pada tahun 1920. Pada perkembangannya, muncul pula istilah *Twin City* atau Kota Kembar. Istilah *Twin City* lebih sering digunakan di benua Eropa, sementara istilah *Sister City* lebih sering digunakan oleh Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, istilah *Sister City* juga digunakan di Indonesia. Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan

¹⁷ *Sister City Bandung Colorful, Beautiful and Friendly*, Bandung; Bagian Kerjasama Daerah Pemda Bandung, 2013, hal. 8.

Hubungan Kerja Sama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Di Indonesia sendiri konsep *Sister City* lebih ditujukan untuk pembangunan ekonomi, akan tetapi bidang-bidang seperti pendidikan dan budaya termasuk salah satu isu yang penting dalam skema *Sister City*.¹⁸

Sister City merupakan kerja sama luar negeri antar pemerintah daerah yang saat ini sedang digencarkan di Indonesia. *Sister City* juga merupakan fenomena dalam hubungan internasional yang saat ini merupakan kewenangan yang tidak wajib namun dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan karena arus globalisasi dunia yang merambah ke nusantara. Secara umum, adanya kerja sama *Sister City* juga dikarenakan adanya beberapa kesamaan baik mengenai karakteristik kota maupun kesamaan pencapaian tujuan dalam bidang-bidang yang akan dilakukan melalui kerja sama *Sister City*. Hal ini juga merupakan salah satu pengaruh kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City*. Tetapi dalam praktiknya kerja sama *Sister City* dilaksanakan untuk melakukan pertukaran demi menguntungkan kedua belah pihak.¹⁹

Kerja sama *Sister City* merupakan persetujuan kerja sama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan. Kerja sama *Sister City* juga dipandang sangat membantu

¹⁸ <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>.diakses 21 Agustus 2019.

¹⁹ Takdir Ali Mukti. *Loc.Cit.* Hal. 5.

bagi fungsi-fungsi pemerintah dalam membina pemerintah daerah dan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan. Kerja sama *Sister City* dengan mitranya di luar negeri diarahkan untuk penyelenggaraan hubungan dan kerja sama yang bermanfaat dan saling menguntungkan.²⁰

Berbicara mengenai kerja sama *Sister City* sebelumnya sudah pernah diteliti oleh para akademisi sebagaimana yang terdapat dalam artikel yang ditulis oleh Heni Nurul Nilawati dalam penelitiannya mengenai “*Pelaksanaan Program Sister City Dalam Perspektif Sound Governance Studi Kasus Kota Surabaya*”.²¹ Disimpulkan oleh Heni Nurul Nilawati bahwa pengertian *Sister City* adalah sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara dalam jangka panjang, kemitraan berbasis luas antara dua masyarakat/daerah di dua negara. Sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara secara resmi diakui setelah resmi dipilih atau ditunjuk tertinggi dari kedua komunitas menandatangani perjanjian. Hubungan ini bertujuan untuk saling memberikan kebermanfaatn bagi kedua belah pihak, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kota yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri, bekerja sama dalam berbagai sektor dan diikat dalam ikatan resmi berupa *Memorandum of Understanding (MoU)*. UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi pintu gerbang penyelenggaraan pemerintahan daerah di era desentralisasi.

Adanya kebijakan desentralisasi inilah yang memberikan ruang gerak lebih bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya termasuk dengan menjalin

²⁰ *Ibid.*

²¹Heni Nurul Nilawati. 2016. Pelaksanaan Program *Sister City* Dalam Perspektif Sound Governance : Studi Kasus Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, (Online), Volume 4, Nomor 2, (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp0eb2b9913ffull.pdf>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019).

hubungan dengan pemerintah di luar negeri. Dalam hal ini, sebagaimana yang dilakukan oleh kota Bandung yang menjalankan hubungan kerja sama dengan pemerintah kota Fort Worth yang ada di luar negeri melalui program kerja sama *Sister City*.

Kemunculan konsep Paradiplomasi yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama internasional dengan mitra kerja sama dengan pihak luar untuk memperluas model jaringan kerja sama yang lebih nyata melalui model praktik kerja sama *Sister City*. Praktik kerja sama *Sister City* di Indonesia tercatat yang paling awal melaksanakan kegiatan kerja sama *Sister City* dengan kota lain yang ada diluar negeri sebagaimana kerja sama yang dilakukan antara pemerintah kota Bandung dengan pemerinatah kota Braunschwieg, Jerman pada 2 Juni 1960. Dari kerja sama yang dilakukan dianggap dapat menghasilkan potensi yang dapat memajukan kualitas daerah, sehingga kerja sama tersebut kemudian diperluas hingga membuka jaringan ke kota-kota lainnya yang ada di luar negeri sehingga menghasilkan mitra kerja sama baru dari pihak luar yakni kerja sama *Sister City* antar kota Bandung dengan kota Fort Worth. Secara umum kerja sama antar kota atau antar wilayah di negara yang berlainan itu terbentuk karena adanya persamaan-persamaan tingkat administrasi, kesamaan masalah yang dihadapi, adanya sumber daya yang berlainan dan bersifat komplementer di bidang sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan, atau peningkatan sumber daya para pejabat daerahnya masing-masing, atau pun dapat meningkatkan arus aliran barang dan jasa di antara kedua belah pihak.²²

²² Takdir Ali Mukti, *Loc.Cit.* hlm 68-69.

Pemerintah kota Bandung secara strategi mengembangkan kerja sama ekonomi daerah berdasarkan peluang serta potensi yang dimilikinya. Kerja sama *Sister City* dilaksanakan berdasarkan kepentingan visi kota yang bersangkutan, yakni Bandung Nyaman, Unggul dan Sejahtera. Kerja sama *Sister City* diarahkan pada pembangunan ekonomi dan pariwisata karena kerja sama bidang ini lebih konkrit dan sinergis untuk kepentingan publik. Program ini bermanfaat sebagai solusi di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya kota. Namun bantuan kerja sama diarahkan tidak berupa uang, tetapi berupa beasiswa untuk menjalani pendidikan atau pelatihan SDM di bidang kesehatan, iptek, ekonomi dan pariwisata, serta sosial budaya yang terkait kepentingan publik. Program kerja sama kota Bandung mendapat sambutan dari mitranya di luar negeri karena sesuai dengan filosofi kerja sama dalam *Sister Province* yaitu *goodwill*, semangat untuk saling mengenal dan mempromosikan potensi masing-masing daerah.²³

Dalam pelaksanaannya, kerja sama *Sister City* harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri juga harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan dan ketersediaan SDM aparatur serta sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing. Istilah *Sister City* atau kota bersaudara yang digunakan di kota Bandung juga didasarkan kepada Permendagri Nomor 1 tahun

²³ *Sister City Bandung Colorful, Beautiful and Friendly*, Bandung; Bagian Kerjasama Daerah Pemda Bandung, 2013.

1992, yang menyebutkan bahwa kerja sama *Sister City* adalah hubungan kerja sama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota administratif dengan pemerintah kota setingkat di luar negeri.²⁴

Hubungan kerja sama yang terjalin antara kota Bandung dengan kota Forth Worth dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya, hubungan kerja sama harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerja samakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerja samakan.

Beberapa program kerja sama telah dilaksanakan oleh kota Bandung dengan kota Fort Worth dalam berbagai bidang yang dikembangkan. Pada tanggal 2 September 1990, ditanda tangannya *Memorandum of Understanding (MoU)* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth yang sepakat bekerja sama dalam bidang-bidang:²⁵

- a. Ekonomi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Administrasi.
- c. Pemuda dan Olahraga.
- d. Sosial dan Kemasyarakatan.

Dari konsep Paradiplomasi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

pemerintah daerah untuk membuka kerja sama internasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dan mampu bersaing di dunia internasional. Namun peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam membangun daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri, akan tetapi membawa nama pemerintah nasional dan untuk itu negara tidak akan kehilangan kedaulatannya.

Paradiplomasi merupakan alat penting dalam perkembangan kerja sama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak asing untuk mempererat hubungan kerja sama yang dilakukan. Hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak asing saling memberi keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah daerah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional melalui pintu Paradiplomasi serta diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kerja sama internasional di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian atau desain penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam arti luas rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada dasarnya rancangan penelitian merupakan “*blueprint*” yang menjelaskan setiap prosedur penelitian mulai dari tujuan penelitian sampai dengan analisis data. Menurut David de Vaus, fungsi rancangan penelitian memungkinkan untuk menjawab *research question* se jelas mungkin. Untuk memperoleh bukti yang relevan perlu lebih dulu menentukan jenis bukti yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji teori, mengevaluasi program atau untuk secara akurat menjelaskan beberapa fenomena.¹ Rancangan penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik, benar, dan lancar.

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren.² Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, dan proses-proses sosial.

¹Umar Suryadi Bakry 2016, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Hal. 107.

²John C. King, *Qualitative Research Method in International Affairs for Master Students*, diakses dari http://www.american.edu/sis/crs/upload.011SP-SIS-680-001_King.pdf, pada 03 September 2019.

Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun variabel dari metode tersebut adalah dinamika kerja sama *Sister City* merupakan variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel dependen. Sedangkan kota Bandung Indonesia dengan kota Fort Worth Amerika Serikat merupakan variabel dependen yang dipengaruhi akibat adanya variabel independen.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dinamika kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh kota Bandung Indonesia dengan kota Fort Worth Amerika Serikat. Proses penelitian ini akan menampilkan data berupa kerja sama *Sister City* yang dilakukan antara kota Bandung dengan kota Fort Worth, bidang kerja sama apa saja yang dilakukan antara kedua negara tersebut, potensi apa saja yang menjadi keunggulan antara ke dua negara bersangkutan, dan peningkatan kerja sama yang dihasilkan oleh negara yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat menjelaskan bagaimana dinamika kerja sama *Sister City* yang dilakukan antara kota Bandung dengan kota Fort Worth.

3.2 Kehadiran Penulis

Dalam penelitian ini, penulis hadir sebagai pengamat penuh. Maksudnya, adalah penulis mengamati dan menganalisa berbagai sumber kepustakaan seperti, buku, dokumen jurnal dan koran elektronik, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan dan sesuai dengan materi penelitian yang dibutuhkan penulis.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat pustaka oleh karena itu, lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Fajar;
- b. Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar;
- c. Perpustakaan Universitas Hasanuddin;
- d. Perpustakaan Wilayah Kota Makassar;
- e. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- f. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan
- h. Berbagai sumber resmi lainnya yang diperoleh secara online.

3.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.³ Adapun sumber data penelitian ini berasal dari buku dan skripsi dari Jurusan Hubungan Internasional dari Universitas yang ada di Indonesia baik itu *hard copy* maupun berbasis online, serta dokumen penunjang dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya . Data juga dikumpulkan dari internet yang bersifat hasil penelitian seperti *e-jurnal*. Sumber-sumber data ini akan membantu penulis dalam menganalisa berbagai fenomena yang terjadi terkait dengan dinamika kerja sama *Sister City* antar kota Bandung Indonesia dengan kota Fort Worth Amerika

³Arikunto, 2010, *Suharsimi, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal. 172.

Serikat. Penulis akan berusaha menjaga validitas data yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. Penulis menganggap sumber data-data tersebut cukup membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang nantinya akan diaplikasikan kedalam tulisan proposal skripsi penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*). Dokumen adalah setiap bahan yang menyediakan informasi tentang fenomena sosial tertentu yang keberadaannya secara independen dari tindakan penulis. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis mengambil data melalui dokumen sekunder yaitu dokumen yang mengacu pada dokumen primer atau menganalisis dokumen primer. Menurut Kenneth D. Bailey, dokumen sekunder adalah dokumen yang diperoleh orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer.⁴

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian.⁵ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa salinan *MoU (Memorandum of Understanding)* atau *MSP (Memorandum Saling Pengertian)* antar kota Bandung Indonesia dengan kota Fort Worth Amerika Serikat.

⁴Kenneth D. Bailey, 1994, *Methods of Sosial Research*, New York: The Free Press, Hal. 294

⁵Nana Syaodin Sukamadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda, Hal. 221-222

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, sehingga akan membentuk suatu kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶ Perlu digaris bawahi, bahwa analisis data adalah suatu proses. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif.

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif diperoleh dari data reduksi kata.⁷ Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih penulis. Mereduksi data dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian data singkatan dan menggolongkan dalam pola yang lebih luas. Dari analisis data tersebut berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai dinamika kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh kota Bandung Indonesia dengan kota Fort Worth Amerika Serikat akan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Menggambarkan realitas yang kompleks melalui hubungan antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

⁶*Op.Cit.* Sugiyono, Hal.334

⁷*Loc.Cit.*

3.7 Pengecekan Validitas Data

Pengecekan validitas data merupakan reliabilitas yang merupakan derajat ketepatan antara data yang berbeda pada obyek penelitian dengan data yang di dapat oleh penulis. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajat konsistensi stabilitas data atau temuan.⁸ Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Selain itu, reliabilitas selalu berdasarkan pada ketekunan pengamatan dan pencatatan, pengkajian yang cermat sehingga akan berpengaruh pada makna yang diperoleh.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan tahap-tahap penelitian yang sistematis sebagai langkah untuk mempermudah proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Menentukan Tema

Pada tahap pertama yaitu menentukan tema yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Penulis lebih banyak melakukan pengamatan terhadap data berupa dokumen. Mencari topik yang menarik. Dalam penelitian, topik yang ditemukan oleh penulis yaitu adanya dinamika kerja sama antar kedua negara yang menjalin kerja sama *Sister City* dengan hasil yang stabil dan menunjang potensi setiap negara tersebut melalui berbagai bidang kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara

⁸*Ibid.* Hal. 363-364.

tersebut yakni antara kota Bandung Indonesia dengan Kota Fort Worth Amerika Serikat.

b. Merumuskan Masalah

Merumuskan jenis penelitian yang berpijak pada kemenarikan topik. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini hingga pada rasionalitas mengapa sebuah topik diputuskan untuk diuji. Dalam merumuskan masalah ini, penulis menentukan dua rumusan masalah yang akan dibahas pada bagian pembahasan penelitian ini.

c. Menentukan dan Melakukan Analisis Data

Menentukan metode analisis, mengingat tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika kerja sama *Sister City* antar kota Bandung Indonesia dengan kota Fort Worth Amerika Serikat, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif.

Dalam tahap analisis data dilakukan melalui bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola yang penting dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

– **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini memuat uraian tentang latar belakang mengenai kerja sama *Sister City* antara kota Bandung Indonesia dengan kota Fort Worth Amerika Serikat dengan tujuan memberika gambaran umum kepada pembaca untuk memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

– **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis memaparkan konsep dan teori untuk menjawab rumusan masalah yang di angkat dengan menggunakan tinjauan konsep Paradiplomasi dan konsep *Sister City*.

– **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab III metode penelitian penulis memberikan pengertian dari metode penelitian yang secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis, sehingga nantinya diperoleh pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran penulis, lokasi penelitian, sumber data, teknik analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

– **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian sekunder dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang diteliti.

– **Bab V Penutup**

Penutup sebagai bab terakhir akan memberikan simpulan dan saran dari keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini. Penulis akan memberikan simpulan dan saran yang dapat dipahami oleh pembaca, baik dosen maupun mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian berkenaan dengan judul penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Georafis Kota Bandung dan Kota Fort Worth

4.1.1 Kota Bandung

a. Profil Bandung

Kerja sama internasional antar pemerintah daerah di Indonesia, pertama kali dilakukan oleh kota Bandung, Jawa Barat. Kerja sama internasional ini dilakukan pertama kali dengan kota Braunschweig, Jerman pada tahun 1960. Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia setelah kota Jakarta dan Surabaya. Kota Bandung juga merupakan pusat perekonomian, sekaligus ibu kota di provinsi Jawa Barat.

Kota Bandung memiliki visi “Terwujudnya kota Bandung yang unggul, Nyaman, Sejahtera” yang memiliki makna yakni berusaha menjadi yang terbaik serta mempertahankan pencapaian, memberikan kebutuhan dasar masyarakat kota Bandung sehingga tercipta kenyamanan serta mampu menciptakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Visi tersebut diwujudkan lewat beberapa misi kota Bandung yakni :

1. Mewujudkan kota Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.¹

b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bandung merupakan salah satu kota pendidikan yang memiliki beberapa perguruan tinggi terbaik dari negeri maupun swasta, dan sekolah-sekolah berprestasi nasional serta memiliki siswa-siswi yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Sektor pendidikan di kota Bandung juga disoroti oleh pemerintah daerah karena ingin memasuki tahap *'Smart City'* sehingga mendorong sektor pendidikan untuk lebih maju.

Pada abad kedua puluh perkembangan pendidikan di Indonesia mulai digencarkan. Salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yakni Technische Hoogeschool te Bandoeng atau TH Bandung juga mulai berdiri di tahun ini.² Perguruan tinggi teknik ini merupakan perguruan tinggi teknik yang berdiri pertama kali di Indonesia. Didirikannya perguruan teknik ini merupakan dorongan gagasan dan keyakinan serta dilandasi semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan dan melihat Indonesia untuk masa depan.³ Pada tanggal 2 Maret 1959, Pemerintah Indonesia meresmikan perguruan tinggi yang sekarang dinamakan Institut Teknologi Bandung. Sejak saat itu kota Bandung mulai dikenal sebagai salah satu kota pelajar dan maju dalam bidang teknologi di Indonesia.

¹Visi dan Misi Kota Bandung.<https://Website.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QR17/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

²Pemkot Bandung .(1991). Bandung Selayang Pandang.

³Website Resmi Institut Teknologi Bandung.<https://www2016.itb.ac.id/about-itb/> diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu hal yang terjadi karena globalisasi. Perkembangan teknologi memiliki keuntungan bagi lembaga maupun badan negara untuk memudahkan dalam pencapaian tujuannya. Teknologi dapat mempermudah kegiatan agar lebih cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas.⁴

4.1.2 Kota Fort Worth

a. Profil Kota Fort Worth

Kerjasama luar negeri antar pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh kota Bandung dengan kota Braunschweig pada tahun 1960, berlanjut dengan kerjasama luar negeri yang baru dengan kota Fort Worth pada tahun 1990. Pemerintah kota Bandung melihat kota Fort Worth memiliki banyak potensi di dalamnya. Industri yang berkembang dan menjadi spesialisasi di kota ini yakni aeronautika, penerbangan, manufaktur pesawat terbang (helikopter komersil dan militer), perusahaan obat dan kesehatan. Kota Fort Worth yang terletak di negara Texas, Amerika Serikat merupakan kota yang terkenal dengan budaya Amerika Lama. Karena hal tersebut, kota Fort Worth disebut juga dengan kota cowboys dan kota budaya.⁵

Kota Fort Worth merupakan salah satu kota yang terletak di Amerika Serikat bagian selatan. Memiliki motto "*Where the West Begins*" yang merujuk pada penduduk asli Amerika yang menetap di sebelah barat garis kota yang sangat terkenal dengan kota cowboys ini, memiliki misi yakni "*Working together to build a*

⁴Wardiana,Wawan. http://Eprints.Rclis.Org/6534/1/Wawan_Perkembangan_N_Ti.Pdf. diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

⁵Fort Worth, Amerika Serikat. http://bdg.ksln.co.id/kota-mou.php?link=fort-worth-texas-amerika_serikat di akses pada tanggal 28 Juli 2019.

strong community". Dengan maksud membangun komunitas yang kuat berarti membangun lingkungan yang kuat, mengembangkan ekonomi, menyediakan komunitas yang aman dan membina lingkungan yang sehat.⁶ Kota Fort Worth adalah salah satu kota yang menjadi tujuan wisata nomor 1 di Texas, Amerika Serikat. Setiap tahunnya, kota ini menyambut 8,8 juta pengunjung.⁷

b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang maju dan berpengaruh di kancah global. Perkembangan teknologi negara maju ini sering menjadi acuan bagi negara-negara lain. Sehingga banyak negara-negara berkembang yang ingin bekerja sama dalam bidang teknologi dengan negara ini. Sedangkan perkembangan teknologi terutama dalam bidang kedirgantaraan yang ada di kota Fort Worth sudah ditunjukkan dari tahun 1911.⁸ Kota ini juga telah memberikan peran penting dalam perkembangan global dan industri kedirgantaraan lebih dari satu abad. Kota Fort Worth juga merupakan tempat dimana 10% pekerja yang ikut memproduksi pesawat terbang nasional. Perusahaan yang berkembang di kota Fort Worth merupakan pusat industri penerbangan, pesawat pertahanan serta yang terbaru yakni liners jet komersial. Kota ini juga merupakan tempat produsen utama yang berupa pemeliharaan serta pelayanan lengkap tentang pesawat. Bahkan, di kota ini juga terdapat pelatihan untuk hal tersebut.⁹

⁶Fort Worth City. *About Fort Worth*. diakses dari <http://fortworthtexas.gov/about/> pada 28 Juli 2019.

⁷*Ibid.*

⁸Fort Worth Aviation & Aerospace diakses dari <https://www.fortworthchamber.com/eco/cluster-aviation.pdf> pada tanggal 28 Juli 2019.

⁹*Ibid.*

Di kota Fort Worth sendiri, terdapat beberapa perusahaan besar bidang teknologi, salah satunya yakni PT Helicopter Bell yang bergerak dalam bidang teknologi transportasi udara. PT Helicopter Bell merupakan industri pesawat terbang pertama yang mendapatkan sertifikasi komersial di dunia. Berdiri sejak 80 tahun yang lalu, PT Helicopter Bell ini telah memberikan 35.000 helikopter terhadap konsumennya.¹⁰ Memiliki konsumen yang berasal dari negara-negara di belahan dunia membuat PT. Helicopter Bell memiliki hubungan yang cukup kuat dengan negara-negara yang mengembangkan teknologi pesawat terbang. Beberapa diantaranya adalah Portugal dan Indonesia. Perusahaan Helicopter Bell ini merupakan perusahaan yang membuat pesawat OH-58 Kiowa Warrior, the V-22 Osprey and the AH-1Z Viper yang merupakan transportasi udara pertahanan yang paling canggih persenjataannya.¹¹

4.2 Latar Belakang Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth.

a. Kerja sama PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Helicopter Bell Amerika Serikat

Pendirian sebuah industri pesawat terbang di Indonesia sebenarnya telah lama diperjuangkan oleh beberapa putra terbaik Indonesia, bahkan sejak era sebelum kemerdekaan. Namun, baru pada tahun 1976 pemerintah berhasil secara resmi mendirikan sebuah industri pesawat terbang dalam dunia penerbangan nasional. Dalam upaya membentuk sebuah industri strategis dalam

¹⁰Company of Bell Helicopter. d iakses dari <http://www.bellhelicopter.com/company> pada tanggal 28 Juli 2019.

¹¹*Ibid.*

bidang penerbangan, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1976 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseeroan (Persero) dalam bidang pesawat terbang. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, maka terjadi penggabungan aset yang dimiliki *Divisi Advanced Technology* dan Teknologi Penerbangan (ATTP) dibawah Pertamina dengan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR), serta TNI Angkatan Udara Indonesia, yang nantinya sebagai modal dasar untuk membangun industri pesawat terbang pertama di Indonesia. Sehingga pada tanggal 26 April 1976 pendirian industri pesawat terbang Indonesia pun disetujui yang berdasarkan akte Notaris nomor 15 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtani (IPTN) yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Peresmian IPTN pun dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1976 oleh Presiden Soeharto, yang kemudian menunjuk Prof. DR. Ing. B.J. Habibie sebagai Direktur Utama.¹²

Ada beberapa pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk mendirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN). Berikut adalah beberapa pertimbangan pemerintah tersebut :¹³

1. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan alat untuk sistem persenjataan untuk pertahanan dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Dengan memiliki sarana ini diharapkan setahap demi setahap bangsa Indonesia mampu menjadi mandiri sehingga tidak tergantung pada bangsa lain.

¹²<https://www.indonesian-aerospace.com/about/history> Sejarah PT Dirgantara Indonesia diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

¹³Edi Utama,dkk.,*Perjalanan Anak Bangsa Menguasai Teknologi Dirgantara*, Bandung:PT Dirgantara Indonesia,2013, hal. 57

2. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan transportasi udara yang peranannya sangat penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, karena pesawat terbang dapat menghubungkan semua titik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
3. Sebagai sarana untuk penguasaan teknologi tinggi dan mutakhir. Dengan penguasaan teknologi tersebut diharapkan akan menumbuhkan ratusan industri pendukung yang akan menyerap banyak tenaga kerja bangsa Indonesia.

Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) memiliki cita-cita untuk menjadi perusahaan yang berkelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global, dengan mengandalkan keunggulan biaya. Untuk itu, guna mewujudkan hal tersebut, IPTN melaksanakan program pengembangan perusahaannya ke dalam dua tahapan yaitu tahap alih teknologi yaitu tahapan menyerap pengetahuan yang tujuan akhirnya adalah guna mendapatkan lisensi dari perusahaan dirgantara di luar negeri untuk merakit pesawat dan helikopter di Indonesia, dan tahapan integrasi teknologi yaitu tahap mengintegrasikan keahlian dan teknologi yang didapatkan dari luar negeri untuk mendesain dan memproduksi pesawat juga komponen pesawat buatan dalam negeri sebagai upaya menyerap keahlian dan teknologi dari luar sebagaimana kerja sama yang dilakukan antara IPTN dengan PT Helicopter Bell, Amerika Serikat.¹⁴

Upaya alih teknologi yang pertama kali dilakukan oleh IPTN dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan dirgantara yang berhasil memberikan

¹⁴<https://www.indonesian-aerospace.com/about/history> Sejarah PT. Dirgantara Indonesia. pdf. , diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

dampak positif bagi perkembangan perusahaan. IPTN berhasil mendapatkan lisensi untuk memproduksi Bell Tier-1, Bell 412, C212 dari Helicopter Bell dan juga berhasil mendapatkan lisensi untuk memproduksi helikopter BO-105 oleh Helicopter Bell, Amerika Serikat. IPTN menerapkan metode *Progressive manufacturing plan* yaitu suatu upaya untuk menyerap teknologi yang diawali dengan pengenalan karakteristik dan teknologi pesawat Bell 412 dan NBO 105 secara detail dan menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan penguasaan teknik-teknik perakitan dan pembuatan bagian-bagian struktur pesawat (*single part*) hingga ke komponen terkecil (*detail part manufacturing*).¹⁵

Dalam tahapan integrasi teknologi B.J. Habibie selaku Direktur Utama melakukan pendekatan dengan Helicopter Bell, Amerika Serikat. Habibie sebagai Direktur Utamanya. Dari program kerja sama yang dilakukan menghasilkan pesawat NBO 105 dimana pesawat NBO 105 merupakan produk yang dihasilkan melalui hubungan kerja sama yang dilakukan selama ini. Dalam proses produksi, IPTN mendapat bagian membuat *outer, tail units*, dan pintu-pintu. Sedangkan Helicopter Bell mendapatkan peran dalam membuat *center wings* dan *noses*¹⁶. IPTN juga menjadi sub kontraktor untuk NBO 105 dan Bell 412 dalam strategi pemasaran di Asia Pasifik. Setelah berhasil memproduksi pesawat NBO 105 dan Bell 412 IPTN terus melakukan pengembangan teknologi terhadap beberapa pesawat yang telah dikuasai tata cara pembuatannya. Dari pengembangn yang dilakukan sehingga

¹⁵*Ibid.*

berhasil memproduksi beberapa pesawat terbaru dari CN235 hingga sekarang yang secara berurutan yaitu, CN235-110 dan CN235-220.¹⁷

Tahun 1986 menjadi salah satu tahun penting dalam sejarah perkembangan Industri Penerbangan tanah air. Pertama yaitu nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio diganti namanya menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Sedangkan yang kedua adalah, tepat ditahun ini pula Bell 412 selaku pemilik Lisensi dari Helicopter Bell berhasil mendapatkan sertifikasi kelayakan terbang dari *Federal Aviation Administration* (FAA). PT Merpati Nusantara Airlines merupakan perusahaan *airlines* pertama asal dalam negeri yang memanfaatkan jasa dari Helicopter Bell. Sejak saat itu Bell 412 yang kemudian diproduksi oleh IPTN mulai menarik perhatian beberapa negara untuk menggunakan jasa dari pesawat ini.¹⁸

Industri dirgantara dalam negeri secara bertahap terus mengalami kemajuan yang signifikan. Dalam selang waktu satu dekade, IPTN berhasil mengalami kemajuan yang pesat dalam proses pengembangan teknologi. IPTN juga berhasil menampilkan beberapa jenis pesawat yang merupakan hasil produksi perusahaan seperti CN235 dan N250 di beberapa pameran pesawat terbang dunia yang diadakan di beberapa negara. Namun perkembangan positif yang dialami oleh industri dirgantara nasional seketika terhenti pada tahun 1998 sebagai dampak dari krisis global yang juga menimpa Indonesia pada waktu itu.

Krisis pada tahun 1998 membuat ekonomi indonesia mengalami keterpurukan. Sehingga pemerintah membutuhkan bantuan dana untuk kembali memulihkan

¹⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301165954-20-114644/jet-tempurproyek-canggih-lintas-negara>.diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

¹⁸<https://www.indonesian-aerospace.com/about/history>Sejarah PT. Dirgantara Indonesia. pdf. , diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

perekonomian negara. Dalam upayanya, Pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia bertemu dengan *Direktur International Monetary Fund* (IMF), Michael Camdessus dalam rangka menandatangani *letter of intent (LoI)* antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Salah satu isi dari *Letter of intent* tersebut memuat klausul yang menyatakan dana anggaran dan non anggaran yang digunakan untuk program IPTN harus dihentikan.¹⁹

Sebagai produsen pesawat yang baru merintis, tentunya belum banyak pesanan pesawat yang diterima oleh IPTN. Ditambah lagi, pasar Asia Tenggara mengalami kemunduran karena hampir semua negara di kawasan ini juga menderita krisis ekonomi. Salah satu yang membuat IPTN bertahan adalah pesanan tetap dari Kementerian Pertahanan, namun jumlah penjualannya tidak cukup untuk menutup biaya operasional perusahaan. Bisnis yang dijalankan oleh IPTN hanya seputar pembuatan komponen atau perawatan dan perbaikan pesawat. Bahkan pada beberapa kesempatan IPTN harus memproduksi produk-produk yang bukan merupakan keahliannya.²⁰

Untuk merestrukturisasi IPTN, Presiden Abdurrahman Wahid mengutus Rizal Ramli, Kepala Bulog saat itu untuk membenahi manajemen perusahaan ini. Misi Rizal adalah untuk mengubah IPTN sebagai industri berbiaya tinggi menjadi industri yang kompetitif seperti di Cina, Brazil, atau India Sebagai simbol dari perubahan paradigma ini, Gus Dur mengubah nama perusahaan ini menjadi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI). Pemberian nama baru ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri

¹⁹*Ibid.*

²⁰Kembangkitan Kembali Industri Peasawat Nasional:Perjalanan PT Dirgantara Indonesia<http://www.pappiptek.lipi.go.id>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

Keuangan Nomor 526/KMK.05/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 771/KMK.04/2001 Tanggal 1 Mei 2001, Rizal mengubah seluruh peralatan dan mesin produksi berbiaya tinggi menjadi lebih murah agar biaya produksi dapat ditekan dan PT. DI dapat kembali menghasilkan profit. Selain itu, manajemen puncak PT. DI pun diganti dengan orang-orang didikan Habibie yang menguasai aspek teknis pembuatan pesawat maupun yang memiliki jaringan luas di industri pesawat internasional.²¹

Pada Mei 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan Industri nasional. Pada perpres tersebut juga termuat tentang pernyataan Presiden mengenai Industri Kedirgantaraan Nasional. Ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap kondisi PT DI yang semakin terpuruk sejak mengalami krisis. Pernyataan Presiden tersebut terdapat pada lampiran halaman 37 poin 3 tentang Industri Kedirgantaraan, yang dinyatakan sebagai berikut:²²

1. Melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri kedirgantaraan.
2. Mengembangkan pesawat berpenumpang kurang dari 30 orang.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat terbang dalam negeri.
4. Meningkatkan sumber pendanaan untuk peningkatan kemampuan pasok industri pesawat terbang nasional.

²¹<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/23/apa-kabar-industri-dirgantara-indonesia>.diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

²²Kembangkitan Kembali Industri Peasawat Nasional:Perjalanan PT Dirgantara Indonesia<http://www.pappiptek.lipi.go.id>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

5. Mengembangkan PT DI sebagai pusat produksi dan litbang dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai Pusat Riset dan produk kedirgantaraan.
6. Mengembangkan pesawat udara jarak pendek dan menengah untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

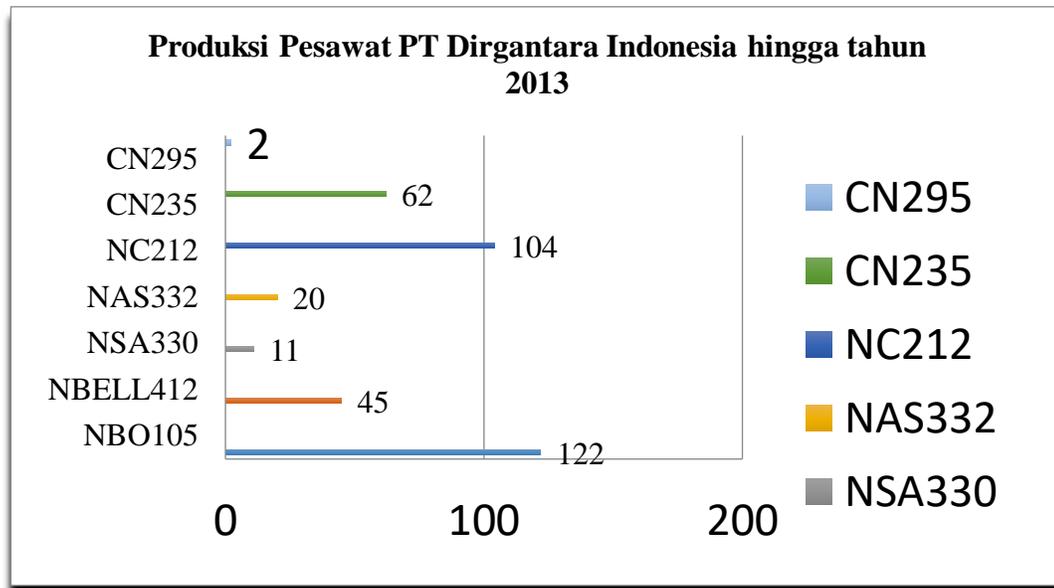
Tahun 2009 merupakan tahun yang memberi harapan bagi perkembangan industri penerbangan nasional. Pada tahun ini, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Pada Bab XVII pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 mengatur tentang pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan, yang berbunyi sebagai berikut :²³

1. Pemberdayaan Industri dan pengembangan teknologi penerbangan wajib dilakukan pemerintah secara terpadu dengan dukungan semua aktor terkait untuk memperkuat transportasi udara nasional.
2. Pemberdayaan Industri dan pengembangan teknologi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Rancang bangun, produksi dan pemeliharaan pesawat udara;
 - b. Mesin, baling-baling, dan komponen pesawat udara;
 - c. Fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - d. Teknologi informasi dan navigasi penerbangan;
 - e. Kebandarudaraan;
 - f. Fasilitas pendidikan dan pelatihan personel penerbangan.

²³*Ibid.*

3. Pengembangan Transportasi udara nasional sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) wajib dilakukan pemerintah dengan melaksanakan beberapa hal berikut :
- a. Mengembangkan riset pemasaran dan rancang bangun yang layak jual;
 - b. Mengembangkan standarisasi dan komponen penerbangan menggunakan muatan lokal dan alih teknologi;
 - c. Mengembangkan industri bahan baku dan komponen;
 - d. Memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
 - e. Memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis dan/atau pasar pengguna dalam dan luar negeri;
 - f. Menetapkan kawasan industri penerbangan terpadu.

Pada tahun 2012 PT. DI memproduksi pesawat, komponen, rancang bangun, dan pengembangan teknologi dan jasa perawatan pesawat. Penjualan pesawat adalah sektor penjualan yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan perusahaan. Hingga pertengahan tahun 2013, PT. DI telah berhasil memproduksi beberapa jenis pesawat baik yang diproduksi sendiri maupun merupakan hasil produksi bersama dengan mitra kerjanya.

Diagram 1. Produksi Pesawat PT Dirgantara Indonesia hingga tahun 2013²⁴

Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa PT DI telah memproduksi ratusan pesawat terbang. Adapun pasar dari semua produk pesawat ini tidak hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri. Dari luar negeri negara-negara yang menggunakan produk PT DI antara lain adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Pakistan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Maroko, Gabon, Bostwana, Burkina Faso, Sinegal, Spanyol, Perancis, Irlandia, Turki, Amerika Serikat, Ekuador, Chili, dan Panama.

Untuk produksi komponen, hingga saat ini PT. DI menjadi pemasok beberapa komponen pesawat produksi luar negeri. Antara lain adalah komponen pesawat Airbus tipe A380, A320, A321, A340, dan A350. PT. DI juga memproduksi

²⁴https://www.indonesiaaerospace.com/news/detail/171_pt+di+kerja+sama+dengan+bell+helicopter+textrondiakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

komponen untuk beberapa tipe pesawat Boeing yang antara lain adalah Boeing B-747, B-777, dan B-787.²⁵

Untuk jasa perawatan PT. DI melayani pemeliharaan pesawat, *overhaul*, perbaikan, Alterasi, dan MORA. Jasa perawatan yang biasanya dilayani adalah untuk pesawat CN235, Bell412, BO105, NC212, NAS332, Boeing B737 seri 200,300,400 dan 500, Airbus A320 dan Foker F100/F27. Sementara itu PT. DI juga melayani untuk rancang bangun meliputi *engineering*, sistem teknologi informasi, dan sistem senjata yang diantaranya adalah jasa sertifikasi semua produk PT. DI, jasa alterasi desain untuk pesawat terbang, Kustomisasi desain dan pengembangan pesawat baru , serta intergrasi desain untuk roket FFAR dan SUT Torpedo.²⁶

Industri strategis adalah industri pengolahan yang memproses output dari industri dasar menjadi barang bernilai tambah yang tinggi. Produk hasil industri ini biasanya adalah barang *intermediate* atau barang modal yang akan digunakan oleh industri hilir untuk memproduksi barang dan jasa.²⁷ Industri strategis biasanya berupa kumpulan badan usaha milik negara (BUMN) terpilih yang bergerak dalam industri berbasis teknologi dan ditetapkan sebagai wahana transformasi industri melalui penguasaan teknologi.²⁸ Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 2014 menyatakan bahwa :

Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah

²⁵<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/23/apa-kabar-industri-dirgantara-indonesia>.diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

²⁶Perkembangan Industri Strategis Pertahanan di Indonesia <http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-18.pdf>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

²⁷Fajar Harry Sampurno, *Keruntuhan Industri Strategis Indonesia*, Jakarta : Khazanah Bahari, 2011, hal. 26.

sumberdaya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.²⁹

PT. Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya industri strategis di Indonesia yang bergerak dibidang Penerbangan. Pendirian PT DI adalah sebuah kesadaran tentang betapa pentingnya transportasi udara untuk keperluan pemerintah, perkembangan ekonomi dan pertahanan nasional sebagai akibat dari letak geografis Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan.³⁰

Menurut Budi Dharmadi, Sebuah Industri Strategis Indonesia harus memiliki beberapa kriteria antara lain :³¹

1. Industri yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
2. Industri yang paling berpengaruh dan dapat mempersatukan atau mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Industri yang mampu mempertahankan eksistensi Indonesia dalam dunia Internasional sekaligus mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional.

Kerja sama pengembangan teknologi yang telah dilakukan oleh PT. DI dengan PT. Helicopter Bell yang dikenal sebagai perusahaan kedirgantaraan yang cukup terkenal sehingga membawa perubahan besar bagi kota Bandung. Selain kriteria dari beberapa citra positif yang dihasilkan. PT DI juga sebagai sebuah Industri penerbangan nasional juga merupakan bagian dari industri strategis Indonesia. Sehingga peran PT DI sangatlah penting. Selain perannya dalam penciptaan

²⁹Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 BAB 1 pasal 4

³⁰Perkembangan Industri Strategis Pertahanan di Indonesia
<http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-18.pdf>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

³¹Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Strategis www.kemenperin.go.id/download/1268, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

alutsista negara tetapi juga untuk pemenuhan alat transportasi domestik dalam menunjang mobilitas penduduk.³²

Keberhasilan PT. Dirgantara Indonesia melalui kerja sama yang dilakukan dengan PT. Helicopter Bell Amerika Serikat yang menghasilkan sejumlah pesawat dengan standar produksi yang cukup baik menjadikan kedua kota ini antara kota Bandung dengan kota Fort Worth memiliki hubungan yang lebih intens. Kesadaran antar kedua kota ini akan hubungan yang cukup baik yang selama ini dijalankan lewat kerja sama pengembangan teknologi kedirgantaraan, sehingga menimbulkan keinginan antara keduanya untuk mengadakan perluasan kerja sama bukan hanya sebatas kerja sama kedirgantaraan semata namun lebih mengarah pada bidang perluasan kerja sama lainnya di masa depan demi peningkatan hubungan baik dan pencapaian ke untungan bersama dalam pembangunan daerah masing-masing.³³

Dari penjelasan diatas mengenai perjalanan kerja sama atara PT Dirgantara Indenesia dengan PT. Helicopter Bell dapat di simpulkan melalui tabel berikut ini:

Tabel hasil kerja sama antara PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Helicopter Bell.

NO	TAHUN	PRODUKSI YANG DIHASILKAN
1.	1976	Berhasil memproduksi Bell Tier-1, Bell 412, C212 dari Helicopter Bell dan juga berhasil mendapatkan lisensi untuk memproduksi helikopter BO-105 oleh Helicopter Bell, Amerika Serikat.
2.	1987	Berhasil memperkenalkan rancangan pesawat N250.

³²Kembangkitan Kembali Industri Peasawat Nasional:Perjalanan PT Dirgantara Indonesia<http://www.pappiptek.lipi.go.id>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019

³³<https://www.indonesian-aerospace.com/about/history>.diakses pada tanggal 08 Agustus 2019.

		Pesawat ini merupakan pesawat pertama yang dirancang sepenuhnya oleh para insinyur IPTN.
3.	1998	Mengalami kemunduran karena hampir semua negara di kawasan ini juga menderita krisis ekonomi.
3.	2008	Melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri kedirgantaraan, Mengembangkan pesawat berpenumpang kurang dari 30 orang, Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat terbang dalam negeri dan Meningkatkan sumber pendanaan untuk peningkatan kemampuan pasok industri pesawat terbang nasional serta mengembangkan PT DI sebagai pusat produksi dan litbang dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai Pusat Riset dan produk kedirgantaraan.
4.	2009	Pemerintah memberlakukan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009. Pada Bab XVII pasal 37 undang-Undang-undang nomor 1 tahun 2009 mengatur tentang pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan.
5.	2012	memproduksi pesawat, komponen, rancang bangun, dan pengembangan teknologi dan jasa perawatan pesawat dan berhasil memproduksi beberapa jenis pesawat baik yang diproduksi sendiri maupun merupakan hasil produksi bersama dengan mitra kerjanya.

Kerja sama PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Helicopter Bell yang telah menghasilkan beberapa pesawat melalui program pengembangan bersama melalui pengembangan teknologi yang di lakukan telah memberikan dampak yang positif khususnya kota Bandung dalam menunjang potensi pengembangan daerahnya.

Kedua daerah yang secara geografis berbeda tidak menyulitkan antara keduanya untuk mengimplementasikan aktivitas kerja samanya dalam menunjang potensi daerah masing-masing. Kegiatan kerja sama yang telah dilakukan antara kedua daerah ini melalui hubungan kerja sama PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Helicopter Bell sejalan dengan konsep Paradiplomasi yang dijelaskan oleh Ivo Duchacek yang dikatakan bahwa terdapat tipe *Global Paradiplomasi*.³⁴ *Global Paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. bentuk paradiplomasi ini sudah berkembang dan memberi kontribusi memperkuat dan melengkapi pada kinerja diplomasi pemerintah pusat.

b. Pengembangan Sumber Daya Melalui Pertukaran Pelajar dan Pelatihan Bagi Pelayanan Masyarakat.

Kerja sama *Sister City* merupakan kerja sama yang tidak hanya fokus dalam pengembangan daerah pada umumnya, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pertukaran ilmu pengetahuan dalam bidang lain seperti pendidikan maupun kebudayaan. Kota Bandung merupakan kota yang ingin mewujudkan misi membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.³⁵ Hal ini dilaksanakan dengan mendukung kerja sama yang bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi secara global.

Pada implementasinya, kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth ini diawali dengan kerja sama dalam bidang pengembangan

³⁴Kurniawan Ariadi. *Loc.Cit.*

³⁵Visi Dan Misi Kota Bandung. [https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRI7/v isi-dan-misi](https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRI7/v%20isi-dan-misi). Diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

teknologi kedirgantaraan, seiring dengan berjalannya waktu yang semula kerja sama ini hanya terbatas pada bidang teknologi kedirgantaraan kini diperluas keberbagai bidang lainnya salah satunya adalah bidang pendidikan. Kota Fort Worth merupakan salah satu kota yang memiliki fokus dan perhatian dalam bidang pendidikan.

Kepentingan kota Bandung sebagai kepentingan aktor yang bukan pemerintah pusat atau *sub state* dalam praktik Paradiplomasi dimana kota Bandung langsung melaksanakan kerja sama dengan kota Fort Worth tanpa harus melakukan perizinan dengan pemerintah pusat. Kepentingan kota Bandung dalam hal ini yakni bidang pendidikan dan transfer ilmu untuk pelatihan tenaga kerja pemerintah daerah.

Kepentingan pendidikan tersebut dapat terwujud melalui program kegiatan *International Leadership Academy* di kota Fort Worth. Kegiatan *International Leadership Academy* berupa *summer camp* ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kepemimpinan global, mempelajari budaya tradisi dan diplomasi global serta menghubungkan pemerintah kota Bandung dengan 7 negara lain yang merupakan *Sister City* dari Fort Worth. Dengan pengirim delegasi ke *International Leadership Academy* ini, siswa-siswi kota Bandung juga menunjukkan kebudayaan dari Indonesia serta membawa makanan khas, pakaian adat dan presentasi kepada 7 delegasi negara lain mengenai kota Bandung secara khusus dan Indonesia secara umum. Dengan adanya promosi kota Bandung ini, pemerintah kota Bandung mendapatkan *school link* untuk

melakukan kerja sama antara sekolah di kota Bandung dengan sekolah di kota Toluca, Mexico dan Guiyang, China.³⁶

Kelanjutan kerja sama antara kota Bandung dan kota Fort Worth juga berdasarkan atas kerja sama *Sister School* yang dilaksanakan SMAN 5 Bandung dengan Arlington Heights High School Fort Worth. *Sister school* yang dilaksanakan antara kedua sekolah ini yakni berupa *school visit* serta *student exchange* dari kota Fort Worth ke kota Bandung dalam rangka pertukaran informasi mengenai pendidikan serta pengenalan budaya di Indonesia oleh pemerintah kota Bandung dan SMAN 5 Bandung.

Tabel Jumlah Peserta Program ILA & Student Exchange SMAN 5 Bandung & Arlington Height High School.

NO	PROGMAN	JUMLA PESERTA
1.	International Leadership Academy 2010	18
2.	International Leadership Academy 2011	17
3.	International Leadership Academy 2012 & Student Exchange Sister School SMAN 5 Bandung & Arlington Height High School	18
4.	International Leadership Academy 2013	12
5.	International Leadership Academy 2014 & Student Exchange Sister School SMAN 5 Bandung & Arlington Height High School	21

³⁶Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri Kota Bandung, "Fort Worth-Amerika Serikat", diakses dari [http://bdg.ksln.co.id/kota-mou.php?link=fort-worth-texas-amerikas](http://bdg.ksln.co.id/kota-mou.php?link=fort-worth-texas-amerikas Serikat) pada tanggal 25 Juli 2019.

6.	International Leadership Academy 2015	10
7.	International Leadership Academy 2016	12

(Sumber : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung/Bagian Biro Kerja Sama Luar Negeri).

Dengan adanya *Sister School* ini, bagi SMAN 5 Bandung mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertukaran baik mengenai informasi maupun perkembangan pendidikan bagi guru. Selain itu, siswa-siswi yang berkesempatan mengikuti program ini juga bertukar pengalaman dengan siswa-siswi kota Fort Worth.

Setelah hampir setahun pelaksanaan kegiatan *International Leadership Academy*, alumni ILA dari kota Bandung yang didampingi oleh Koordinator ILA Bandung, Bapak Herman Benyamin diminta oleh pemerintah kota Bandung untuk ikut menyampaikan pengalaman serta ilmu yang didapatkan selama di kota Fort Worth kepada beberapa sekolah di Bandung serta memberikan informasi mengenai kegiatan ILA yang akan dilaksanakan. Hal tersebut akan lebih spesifik dilaksanakan saat acara “Pembekalan Siswa-Siswi Delegasi Kota Bandung dalam *International Leadership Academy*” setiap tahunnya untuk delegasi yang selanjutnya akan berangkat.

Program pelaksanaan ILA (*International Leadership Academy*) ini yang menjadi bagian dari program unggulan kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth merupakan program yang dilaksanakan di kota Fort Worth dengan mengutus perwakilan delegasi dari beberapa siswa-siswi dari kota Bandung untuk mengikuti latihan kepemimpinan internasional yang

bertempat di kota Fort Worth. Pengiriman perwakilan delegasi dari kota Bandung dalam keikutsertaan dalam kegiatan ILA tersebut menggunakan dana pribadi siswa-siswi serta bantuan alokasi dana yang diambil dari dana APBD kota Bandung.³⁷

Menurut staf ahli Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung, adanya semangat untuk mempelajari kepemimpinan global dengan negara lain merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan siswa-siswi kota Bandung. Sehingga, adanya program dari *Sister City* untuk mengirimkan delegasi ke kota Fort Worth dapat membuat siswa-siswi Bandung mengerti semangat bersaing global.³⁸

Tidak hanya keuntungan untuk siswa-siswi SMA di Bandung, kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dan kota Fort Worth juga menghasilkan keuntungan dalam peningkatan tenaga edukatif yakni melalui beasiswa untuk mahasiswa studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran. Beasiswa yang diberikan oleh kota Fort Worth melalui kontak person Dr. Carolyn Spence Cagle. Beasiswa berikut diberikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Fort Worth dalam bidang keperawatan. Selain dari berbagi pengalaman ke pelajar yang akan berangkat selanjutnya, dengan adanya pengiriman delegasi kota Bandung ke kota Fort Worth dapat menambah jaringan dan kemungkinan program kerja sama. Hal inilah yang membuat kota

³⁷ Staf Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

³⁸ Irma Joanita . 2017. *The Sister City Cooperation between Bandung, Indonesia and Fort Worth, United State of America*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Online). (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12165/11.%20naskah%20Publikasi.pdf?sequence=14&isAllowed=y>). di akses pada tanggal 25 Juli 2019).

Bandung tetap melaksanakan kerja sama dengan kota Fort Worth, dimana muncul adanya kemungkinan-kemungkinan dalam membuat program kerja sama yang baru. Hal tersebut dapat dilihat setelah kerja sama *International Leadership Academy* tahun 2010, telah dilaksanakan peninjauan antara Universitas Padjajaran Bandung yang diwakili oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Padjajaran dengan Texas Christian University. Menurut Pat Miller, salah seorang *council* di Texas Christian University mengungkapkan, terdapat peluang kerja sama antara Universitas Padjajaran dengan Texas Christian University seperti *student exchange, staff exchange, joint degree, dan joint research*.³⁹

Selain adanya program yang terus bertambah dari pertukaran pelajar, *school link* dan beasiswa bagi tenaga edukatif di Bandung, kerja sama antara kota Bandung dengan kota Fort Worth juga dilaksanakan dalam bentuk pelatihan serta pertukaran ilmu dalam beberapa bidang yang menunjang pelayanan masyarakat. Di bawah ini merupakan tabel kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung dan kota Fort Worth untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel program kerja sama kota Bandung dengan kota Fort Worth dalam meningkatkan pelayanan masyarakat sampai dengan tahun 2015

NO	DINAS YANG TERKAIT	KEGIATAN PROGRAM
1.	Dinas Pemadam Kebakaran kota Bandung dengan Fort Worth Fire Fighter Academy.	Pelatihan "Emergency Preparedness. Pertukaran Pengalaman mengenai pemadaman kebakaran, Simulasi anti teroris di dalam pesawat

³⁹ *Ibid.*

		terbang.
2.	Perusahaan Daerah Air Bandung dengan Fort Worth Water Department.	Bantuan pelatihan tenaga ahli dalam bidang air bersih dan air kotor.
3.	KADIN kota Bandung dengan investor dan pengusaha di kota Fort Worth.	Tour Operator, memfasilitasi investor dan pengusaha kota Fort Worth untuk melihat kemungkinan investasi di Bandung.
4.	Pemerintah Kota Bandung melalui R.S. Hasan Sadikin Bandung dengan University of North Texas Health Science Center.	Pembuatan website kesehatan untuk sharing pengetahuan tentang kesehatan

(Sumber : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung/Sub Bagian Biro Kerja Sama Luar Negeri).

Dapat dilihat dari tabel di atas, pelatihan maupun fasilitas yang melibatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dari dinas maupun pihak yang terkait dengan pelayanan masyarakat membuat kota Bandung tetap menjalin kerja sama dengan kota Fort Worth. Kedua kota melaksanakan kerja sama dengan baik agar tetap berkelanjutan. Pengembangan bidang hubungan kerja sama internasional yang dilakukan antar kota Bandung dengan kota Fort Worth yang diawali dari kerja sama teknologi hingga diperluas kebidang lainnya seperti pendidikan sejalan dengan konsep Paradiplomasi menurut Rino Adibowo dan Sylvia Octa Putri dalam jurnal yang berjudul *Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung*, menuliskan bahwa Paradiplomasi merupakan

pengembangan dari adanya hubungan luar negeri secara langsung yang dilakukan oleh aktor sub nasional, yang mempunyai tujuan tertentu dalam berbagai bidang yang ditujukan untuk kesejahteraan daerah yang dinaungi pemerintah sub nasional tersebut dibawah pengawasan pemerintah nasional dalam rangka menghadapi globalisasi. Sementara itu di Indonesia perkembangan konsep Paradiplomasi masih minim terutama karena kebijakan luar negeri masih merupakan ranah kekuasaan pemerintah pusat. Namun, kecenderungan kehidupan modern memerlukan cara berpikir yang baru dimana perkembangan hubungan internasional dan politik nasional koheren dengan proses desentralisasi. Akibatnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam arena internasional adalah suatu keniscayaan untuk menjalin hubungan kerja sama internasional.⁴⁰

4.3 Bentuk Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung dengan Kota Forth Wort

adanya ikatan kerja sama melalui penandatanganan MoU membuat keduanya mengimplementasikan potensi yang dimiliki dalam bentuk bidang kerja sama. Adapun bentuk kerjasama yang telah dilakukan diantaranya:

a. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu potensi yang dimiliki oleh kota Bandung dan kota Fort Worth yang dapat dikembangkan dalam kerangka kerja sama *Sister City* adalah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga, dalam bidang Ilmu

⁴⁰ Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri. *Loc.Cit.*

Pengetahuan dan Teknologi ini kedua kota telah menyusun dan melaksanakan beberapa program, yakni diantaranya :⁴¹

- a. Kerja sama *Sister School* SMAN 5 Bandung dengan *Arlington Heights High School* Fort Worth. Kerja sama *sister school* yang telah dikerja samakan sejak tahun 2010.
- b. Pelatihan pemadam kebakaran antara staf pemadam kebakaran kota Bandung di kota Fort Worth pada tahun 2011.
- c. Penjajakan antara UNPAD Bandung dengan Texas Christian University pada tahun 2012.
- d. Kerja sama peningkatan tenaga edukatif Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Fort Worth pada tahun 2013.
- e. Kunjungan delegasi ke Fort Worth untuk peningkatan kerja sama dilaksanakan pada tahun 2015.
- f. Kunjungan delegasi kota Bandung (diwakili oleh SMA/SMK Angkasa) dalam Mayor's Dinner, *City Day* pada tahun 2018.
- g. Kunjungan siswa fort Wort ke kota Bandung pada tahun 2019.

b. Bidang Ekonomi, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata

Perkembangan ekonomi suatu daerah salah satunya ditentukan oleh sektor industri dan perdagangan. Kota Fot Worth yang memiliki banyak pengusaha dan berpengaruh dalam kegiatan *Sister City* tentu akan membangun kerja sama

⁴¹Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung/ Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

dengan kota Bandung dalam bidang ini. Tidak hanya itu, perkembangan pariwisata di kedua kota juga merupakan salah satu sektor yang menambah pemasukan daerah. Seiring berjalannya *Sister City* antara kedua kota ini, telah berjalan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, industri dan pariwisata yakni :

1. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) kota Bandung mengadakan kegiatan Tour Operator dengan mengundang Tour Operator dari Fort Worth beserta Investor dan Pengusaha Potensial untuk datang ke kota Bandung.
2. Misi promosi pariwisata dan budaya kota Bandung ke kota Fort Worth melalui kunjungan dan program pertukaran pelajar.

c. Bidang Kepemuadaan dan Olahraga

Dukungan pemerintah kota Fort Worth kepada Bandung juga dalam bidang kepemudaan dan Olahraga dimana dalam *MoU* keduanya ingin menjalin kerja sama dalam dua bidang ini. Beberapa dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada kota Bandung, yakni :

1. Sumbangan peralatan Base Ball untuk perkembangan Olah Raga Base Ball di kota Bandung. Pelatihan langsung diberikan kepada para pelatih Base Ball Perbasasi kota Bandung.
2. Kota Bandung mengirimkan delegasinya ke Fort Worth dalam rangka berpartisipasi pada program Akademi Kepemimpinan Internasional (*International Leadership Academy*). ILA telah dilaksanakan pada tahun 1989 dan merupakan program dari Fort Worth *Sister Cities* yang paling diunggulkan. Kegiatan ILA diikuti oleh siswa/i dari SMU di kota Bandung

yang bertujuan untuk menciptakan persahabatan dan meningkatkan kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, dan kemampuan memecahkan masalah. Hingga saat ini, program ILA ini masih dilaksanakan di kota Fort Worth dan diikuti oleh seluruh kota yang bekerja sama *Sister City* dengan kota Fort Worth, yakni : Reggio Emilia (Italia), Trier (Jerman), Nagaoka (Jepang), Budapest (Hongaria), Toluca (Mexico), Mbabane (Swaziland) dan Guiyang (China).

Selain kerja sama di atas, sebagai kota di negara yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, kota Fort Worth memberikan bantuan/hibah yang bersifat sosial dan kemasyarakatan, yakni :

1. Bantuan kepada 6 (enam) Panti Asuhan di kota Bandung,
2. Bantuan bagi biaya pelatihan dan belajar bagi peningkatan sumber daya manusia dari kota Bandung,
3. Program Emergency Preparedness Grant (Bantuan Persiapan Keadaan Darurat) tahun 2003 dan 2004,
4. Bantuan bencana alam tsunami Pangandaran pada tahun 2006,
5. Bantuan alat-alat kesehatan dan alat-alat untuk penderita autis untuk RS Daerah di kota Bandung,
6. Bantuan buku bagi pemerintah kota Bandung,
7. Bantuan bagi biaya pelatihan dan belajar bagi peningkatan sumber daya manusia dari kota Bandung, dan
8. Pemerintah kota Fort Worth membantu PDAM kota Bandung dalam hal tenaga ahli di bidang pengelolaan air bersih dan air kotor.

Bantuan-bantuan yang bersifat hibah ini juga diatur dalam Undang-Undang. Hibah yang diberikan oleh kota Fort Worth akan tetap melewati birokrasi pemerintahan pusat dimana barang-barang hibah tersebut harus mendapatkan dasar hukum dengan didaftarkan ke aset negara melewati Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri kemudian Sekretariat Negara dan baru dapat dinikmati oleh pemerintah kota. Adanya beberapa hambatan birokrasi pusat terkadang membuat pemerintah daerah lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan selain hibah yang berbentuk barang (alat-alat/buku) maupun uang karena harus melewati birokrasi pemerintah pusat yang panjang dan akan lebih lama diterima. Tetapi, hal ini tidak membuat kota Bandung pasif dalam melaksanakan kerja sama *Sister City* tetapi semakin mengencangkan kerja sama lebih luas selain *Sister City*.

Pelaksanaan bentuk kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth yang mencakup berbagai bidang kerja sama, mulai dari bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ekonomi, Perdagangan, Industri, Pariwisata, serta bidang Kepemudaan dan Olahraga. Mendapatkan alokasi anggaran pendanaan dari sebagian besar dana anggaran APBD kota Bandung. Penggunaan anggaran APBD kota Bandung dalam hal ini pembiayaan program kerja sama luar negeri/*Sister City* menggunakan anggaran APBD dan tidak ada rincian anggaran khusus untuk pembiayaan program kerja sama *Sister City* yang dijelaskan dalam Laporan Tahunan anggaran APBD kota Bandung. Bahkan program ILA (*International Leadership Academy*) yang mana program tersebut merupakan bagian dari Program *Sister City* yang dikenal sebagai program

unggulan sejak terjalannya kerja sama ini, menggunakan pembiayaan pribadi dari perwakilan delegasi yang di utus ke kota Fort Worth dalam mengikuti kegiatan ILA.⁴²

4.4 Dinamika Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth

Melalui kerja sama *Sister City* yang dilakukan antara kota Bandung dengan kota Fort Worth, dalam implementasinya, bidang kerja sama yang telah dilakukan telah sesuai dengan dasar hukum kerja sama *Sister City* yang sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui bahwa UU tersebut memberikan ruang gerak dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya dalam hubungan kerja sama internasional. Sedangkan dari sisi tata cara dan prosedur pelaksanaan kerja sama *Sister City* di Indonesia meliputi 10 (sepuluh) tahapan sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerjasama *Sister City*, yang dimulai dari tahapan peninjauan hingga ke tahapan pelaporan hasil kegiatan, hasil kajian menunjukkan tata cara/prosedur yang dilaksanakan pemerintah kota Bandung telah sesuai dengan prosedur yang ada. Kurang optimalnya pelaksanaan kerja sama. Jadwal waktu antara persiapan dan penandatanganan *MoU* tidak sesuai dengan rencana. Salah satu penyebabnya adalah persetujuan dari DPRD berdasarkan pertimbangan aspek pendanaan dan kesiapan pemerintah kota.⁴³ Selain itu dari bidang kerja sama yang telah dilakukan yang diawali dari kerja

⁴² Staf Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

⁴³Wawancara sub bagian kerjasama luar negeri/badan kesatuan bangsa dan politik kota bandung.

sama dalam bidang teknologi, diperluas hingga ke bidang-bidang kerja sama lainnya mulai dari bidang Ekonomi, Perdagangan, Industri, Pariwisata, hingga bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dari beberapa kerja sama yang sudah dilakukan telah memberikan banyak perubahan khususnya kepada kota Bandung pada umumnya. Selain itu perluasan jaringan kerja sama yang telah dilakukan juga sesuai dengan konsep Paradiplomasi sebagai mana yang telah dikemukakan oleh Barros dalam Wolff, yang mendefinisikan bahwa Paradiplomasi adalah alat penting untuk menegaskan kembali gagasan sebuah proyek nasional yang mencari pembangunan yang lebih besar dan otonomi lebih besar bagi sub unit nya. Dalam konteks ini, pentingnya kerangka kelembagaan dan hukum yang ada pada Pemerintah yang menjadi aktor sub nasional untuk membangun daerahnya tanpa berpangku tangan terhadap kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi sesuai dengan aturan dan hukum nasional yang berlaku, sehingga menciptakan sinergi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.⁴⁴ Kemudian bentuk-bentuk kerja sama yang sudah dihasilkan antara kedua kota yang berbeda negara ini juga mengindikasikan sebuah pencapaian prestasi yang diperoleh dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat sebagai dampak positif dari aktivitas kerja sama yang dilakukan dengan pilak luar melalui kerangka kerja sama *Sister City*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andre dalam jurnal yang berjudul *Lessons from the Developed World* bahwa Paradiplomasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah sub negara berkembang bahwa masyarakat dapat memiliki banyak fokus yang

⁴⁴ Wolff, Stefan. *Loc.Cit.*

berbeda. Tidak semua pemerintah daerah telah mendekati hubungan internasional dengan cara yang sama. Ada tiga lapisan paradiplomasi yaitu Lapisan pertama berkaitan dengan isu-isu ekonomi. Dalam konteks ini, sub negara pemerintah bertujuan membangun keberadaan internasional untuk tujuan menarik investasi asing, memikati perusahaan-perusahaan internasional ke wilayah tersebut, dan penargetan pasar baru untuk ekspor. Lapisan kedua dari paradiplomasi melibatkan kerja sama (budaya, pendidikan, teknis, teknologi dan lainnya). Lapisan ketiga paradiplomasi melibatkan pertimbangan politik.⁴⁵

Kemudian dari hubungan kerja sama *Sister City* yang telah dilakukan antara kota Bandung dengan kota Fort Worth tidak lepas dari hambatan yang dilewati. Jauh sebelum berjalannya kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth kedua kota ini telah mengalami hambatan yang ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang sempat melanda berbagai belahan dunia termasuk Amerika Serikat diawal kerja sama antara kota Bandung dengan kota Fort Worth.⁴⁶ Kemudian anggaran serta jarak juga menjadi kendala dalam pelaksanaan setiap agenda kerja sama baik yang telah dilakukan begitupula yang sedang direncanakan seperti program ILA (*International Leadership Academy*) kunjungan siswa-siswi ILA tidak terlalu berjalan dengan lancar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya program kerja sama Bandung dengan Fort Worth lebih banyak yang aktif.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Loc.Cit.* Hal. 14.

⁴⁷ Wawancara sub bagian kerjasama luar negeri/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Selain itu, terlepas dari adanya krisis ekonomi serta anggaran yang kurang maksimal yang pernah dihadapi oleh keduanya, juga dari segi transparansi pelaksanaan kerja sama *Sister City* kota Bandung dengan kota Fort Worth dalam hal ini belum adanya sosialisasi penuh dari pemerintah kepada masyarakat, baik dari segi program kerja sama, manfaat, dan pelaksanaannya bagi warga kota Bandung disebabkan oleh pemerintah kota Bandung yang menganggap hasil dari kerja sama ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang begitu besar yang dapat dinilai secara umum oleh masyarakat kota Bandung pada umumnya. Sehingga hanya sedikit warga yang mengetahuinya, bahkan mungkin sebagian besar warga kota Bandung tidak mengetahui adanya program kerja sama kota Bandung dengan kota di luar negeri maupun di dalam negeri. Terkait dengan penilaian transparansi hasil dari kerja sama yang dihasilkan dari adanya kerja sama *Sister City* ini bukan berarti kerja sama ini tidak membawa perubahan atau hasil yang baik namun karena hubungan yang terjalin dengan agenda kerja sama yang berkelanjutan belum sepenuhnya terealisasikan dengan maksimal.⁴⁸

Kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung telah melewati peninjauan dan kesepakatan hingga persetujuan dari pihak-pihak terkait. Dalam peraturan Kemenlu juga terdapat prosedur umum yakni mengenai adanya hubungan diplomatik antara kedua negara serta tidak mengganggu baik keamanan politik maupun keamanan dalam negeri. Walaupun banyak dinamika yang dilalui antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang dilalui sebelum kemerdekaan RI, akhirnya pasca kemerdekaan hubungan diplomatik antara

⁴⁸ Irma Joanita. *Loc.Cit.* Hal. 15.

Indonesia dan Amerika Serikat dimulai dengan didirikannya Kedutaan Besar di masing-masing negara. Indonesia yang pada saat itu memberikan amanah kepada Dr. Ali Sastroamijoyo untuk menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, pada tahun 1950.⁴⁹

Kota Bandung merupakan salah satu kota Asia yang dipercaya oleh kota Fort Worth untuk melakukan kerja sama. Kota Fort Worth merupakan kota pertama yang menjadi *Sister City* di Indonesia. Kota Fort Worth memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai melalui kerja sama *Sister City*. Dengan adanya kerja sama *Sister City* dengan kota Bandung beberapa tujuan salah satunya yakni mempererat hubungan internasional Amerika Serikat dengan negara lain dapat dicapai dengan kota Bandung, Indonesia. Dengan adanya hubungan kerja sama *Sister City* ini, komunikasi antara pemerintah daerah kota Bandung dengan pemerintah daerah Fort Worth masih berlanjut dan tetap harmonis walaupun hanya beberapa program yang berjalan tetapi tetap mengingatkan bahwa kota Fort Worth dan kota Bandung merupakan kota kembar sejak tahun 1990. Kerja sama ini juga bertujuan dalam membantu menciptakan dunia yang lebih damai serta menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka yang mengarah pada konflik, terutama Fort Worth *Sister Cities* menginginkan hubungan yang lebih baik antara Amerika Serikat dengan negara mayoritas Islam.⁵⁰

⁴⁹Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri Kota Bandung, "*Sister City*", diakses dari <http://bdg.ksln.co.id/sejarah.php> pada tanggal 25 Juli 2019.

⁵⁰Bandung, Indonesia. Our *Sister Cities*. <http://www.fwsistercities.org/city/bandung> – indonesia. Di akses pada tanggal 27 Juli 2019.

Setelah prosedur diplomatik telah dipenuhi, kota Bandung bersama kota Fort Worth sepakat untuk mengajukan kerja sama *Sister City* dan mengikuti prosedur pengajuan kerja sama *Sister City* yang harus melewati Gubernur Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk menyetujui program dan dibentuk kelompok untuk perumusan *Memorandum of Understanding (MoU)* kerja sama *Sister City*. Setelah seluruh prosedur dipenuhi, ditandatangani *MoU*. Kerja sama *Sister City* Bandung dengan Fort Worth, yang telah berjalan selama 29 tahun, kerja sama *Sister City* yang berlatar belakang memiliki kesamaan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kota Bandung telah mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan dari kerja sama *Sister City* ini walaupun terdapat juga beberapa halangan atau hambatan selama bekerja sama.

Beberapa program kerja sama telah dilaksanakan oleh kota Bandung dengan kota Fort Worth dalam berbagai bidang yang dikembangkan. Pada tanggal 2 September 1990, ditanda tangannya *MoU* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth yang sepakat bekerja sama dalam bidang-bidang:

- a. Ekonomi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Administrasi.
- c. Pemuda dan Olahraga.
- d. Sosial dan Kemasyarakatan.

Sesuai dengan *MoU Sister City* kota Bandung dengan kota Fort Worth, perjanjian ini dimulai saat tahun 1990 berlaku selama 5 tahun, tetapi tetap

berlanjut secara otomatis selagi tidak ada pihak yang memutuskan perjanjian. Apabila ada pihak yang akan memutuskan akan diurus 6 bulan sebelum habis masa berlaku *MoU*.

Adanya kepentingan yang spesifik dari Kota Bandung dalam bidang pendidikan, akhirnya kota Bandung sebagai aktor *sub-state* melaksanakan kewenangan daerahnya dengan menyetujui dan bersepakat untuk mengajukan kerja sama *Sister City* dengan kota Fort Worth. Saat ini, kondisi hubungan antara kota Bandung dan kota Fort Worth masih terjalin dengan baik. Kedua kota masih berada di bawah *MoU* kerja sama *Sister City* yang pada bulan September 2016 diperpanjang secara otomatis lagi hingga pada tahun 2021. menurut staf ahli Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri kota Bandung, dinamika hubungan kota Bandung dan kota Fort Worth sempat mengalami kemunduran pada saat krisis ekonomi melanda berbagai belahan dunia termasuk juga dengan Amerika Serikat. Namun, setelah beberapa saat krisis ekonomi melanda, kerja sama antara kota Bandung dan kota Fort Worth memang tidak berjalan secara intens tetapi masih terdapat program yang berjalan dan masih ada komunikasi diantara kedua belah pihak untuk sama-sama mengembangkan daerah masing- masing.

kota Fort Worth tetap berkomunikasi dengan kota Bandung hingga melanjutkan kembali beberapa program dan sampai saat ini masih terjalin dengan baik. Saat ini, hubungan kota Bandung dengan kota Fort Worth lebih banyak komunikasi dan koordinasi melalui berbagai sarana komunikasi yakni telpon, email, dsb.⁵¹

⁵¹ Irma Joanita. *Op.Cit.* Hal. 14.

Kunjungan antara keduanya memang tidak terlalu banyak dilakukan, menurut dokumentasi dari Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung, setelah tahun 2008 secara resmi perwakilan pemerintah kota Bandung melakukan kunjungan yang dikhususkan untuk membahas penguatan kerja sama *Sister City* ke kota Fort Worth selama 2 kali. Kemudian, untuk kunjungan dari perwakilan pemerintah kota Fort Worth ke kota Bandung kurang lebih sama 2 - 3 kali. Untuk kunjungan dalam rangka umum yakni pada setiap program kerja sama *Sister City* dijalankan akan ada perwakilan dari kedua pemerintahan kota.

Hingga saat ini, sudah beberapa program kerja yang berjalan tetapi yang sampai saat ini masih bertahan dan terus dilaksanakan keduanya yakni kegiatan *International Leadership Academy*. Sejak tahun 2010, pemerintah kota Bandung telah mengirimkan delegasinya ke kota Fort Worth untuk mendapatkan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat khususnya terkait dengan kegiatan ILA yang tentunya pengalaman yang didapatkan dari perwakilan delegasi diharapkan dapat menunjang potensi keilmuan serta pengalaman yang dapat disalurkan kepada masyarakat pada umumnya. Selain itu, pemerintah kota Bandung juga diberi kesempatan untuk mempromosikan wisata kota serta budaya yang berkembang di Bandung. Tidak hanya itu, murid-murid kota Bandung yang berkesempatan mengikuti *International Leadership Academy* tersebut juga lebih meluas wawasannya karena bertemu 7 delegasi dari kota yang menjadi partner dari Fort Worth *Sister Cities*. Pada tahun 2017 ini, program ILA akan dilaksanakan di bulan Juni-Juli saat musim semi di Fort Worth.⁵²

⁵² Irma Joanita. *Loc.Cit.* Hal. 11.

Selain program ILA, program yang terlaksana yakni *Sister School* antara SMAN 5 Bandung dengan Arlington Heights High School, Fort Worth. Menurut Guru yang mengampu *Sister School* SMAN 5 Bandung, pertukaran pelajar ini dilaksanakan setiap tahun selama 1 tahun.⁵³

Jika dilihat dari programnya saja memang hanya satu program tahunan yang sampai saat ini memberikan keuntungan bagi kota Bandung terutama untuk siswa-siswi, tetapi kerja sama ini terus terjalin dan pemerintah kota Bandung tidak menolak kemungkinan untuk merangkai program-program lagi bersama dengan kota Fort Worth.

Selain itu kerja sama antara kota Bandung dengan kota Fort Worth juga tentunya didasari atas beberapa kriteria persyaratan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan hubungan kerja sama *Sister City*, selain itu adanya landasan ikatan yang melegalkan kerja sama yang dilakukan antara keduanya yakni melalui pengesahan perjanjian kerja sama atau *MoU (Memorandum off Understanding)*. Kerja sama ini sejalan dengan konsep *Sister City* yang dijelaskan oleh Heni Nurul Nilawat dalam penelitiannya mengenai “Pelaksanaan Program *Sister City* Dalam Perspektif *Sound Governance* Studi Kasus Kota Surabaya.”⁵⁴ Disimpulkan oleh Heni Nurul Nilawat bahwa pengertian *Sister City* adalah sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara dalam jangka panjang, kemitraan berbasis luas antara dua masyarakat/daerah di dua negara. Sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara secara resmi diakui setelah resmi dipilih atau

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Heni Nurul Nilawati. 2016. Pelaksanaan Program *Sister City* Dalam Perspektif *Sound Governance* : Studi Kasus Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, (Online), Volume 4, Nomor 2, (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp0eb2b9913ffull.pdf>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019).

ditunjuk tertinggi dari kedua komunitas menandatangani perjanjian. Hubungan ini bertujuan untuk saling memberikan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kota yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri, bekerja sama dalam berbagai sektor dan diikat dalam ikatan resmi berupa *Memorandum of Understanding (MoU)*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hubungan kerja sama yang terjalin antara pemerintah kota Bandung dengan Pemerintah kota Fort Wort yang sudah melewati 5 (lima) periode yang awalnya hanya menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan teknologi kedirgantaraan kini meluas diberbagai jaringan kerja sama mulai dari kerja sama bidang Ekonomi, Perdagangan, Industri, Pariwisata, hingga bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dari hasil perluasan kerja sama yang dihasilkan memberikan dampak positif antar keduanya khususnya bagi pemerintah kota Bandung yang dibuktikan melalui bentuk kerja sama yang telah dihasilkan dari setiap periode kerja sama yang dilakukan. Selain itu adanya jalinan kerja sama serta hasil yang telah didapatkan membuat kedua kota ini khususnya kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan melalui pengembangan-pengembangan kerja sama yang dilakukan serta mengangkat kota Bandung sebagai kota yang memiliki citra positif dalam bidang kerja sama *Sister City*.

Jarak dan anggaran yang belum maksimal serta kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan adanya kerja sama yang dilakukan oleh kedua kota yang didalamnya diperlukan partisipasi aktif masyarakat kota dalam menjalankan kegiatan. Kemudian, krisis Eropa juga turut menjadi penghambat keberlangsungan kerja sama kedua kota. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang menjabat menentukan keberlangsungan kegiatan melalui *Sister City*, hal ini berdasarkan

pada adanya prioritas kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah yang memegang jabatan. Namun di sisi lain, terdapat peluang seperti pertukaran pelajar yang kegiatannya dapat diprakarsai langsung oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengambil peran dalam membangun kualitas pendidikan kota dengan cara menerapkan *Memorandum of Understanding* yang telah disetujui bersama karena pengembangan pendidikan juga merupakan aset daerah. Lulusan tersebut kemudian diharapkan dapat mengembangkan kota nya lebih maju. Selain itu, keunggulan masing-masing kota dalam bidang ekonomi kurang dioptimalkan dalam kerja sama yang disepakati oleh kedua kota.

Hubungan kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Fort Worth yang telah berjalan kurang lebih 29 tahun lamanya tidak lepas dari adanya hambatan serta dinamika yang di alami antara kedua daerah dimana krisis ekonmi yang pernah melanda Indonesia yang menjadi awal kendala optimalnya kerja sama yang dilakukan serta jarak begitupun dana menjadi penghambat kurang efesiennya kerja sama ini. Namun karena pertimbangan program sebagian kerja sama masih berjalan dengan baik seperti program ILA (*International Leadership Academi*) yang sudah memberikan dampak positif kepada kota Bandung membuat kerja sama ini tetap dilanjutkan dengan program bidang kerja sama yang sudah disepakati sebagaimana yang tercantum dalam piagam persahabatan atau *MoU* (*Mermorandum of Understanding*) yang mengikata antara keduanya.

Berjalannya beberapa program bidang kerja sama yang telah di sepakati sebelumnya baik dari bidang Ekonomi, Perdagangan, Industri, Kepariwisataaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan lain-lain memberikan dampak yang positif antara

keduanya yang ditandai dengan berlanjutnya kegiatan ILA (*International Leadership Academy*) yang diadakan di kota Fort Worth dan juga kegiatan program pelatihan Emergency Preparednes atau dalam hal ini kegiatan pertukaran pengalaman mengenai pemadam kebakaran dan Simulasi anti teroris di dalam pesawat terbang dan bukan hanya itu melalui kerja sama *Sister City* tersebut juga kota Bandung juga memfasilitasi investor dan pengusaha kota Fort Worth untuk melihat kemungkinan investasi di kota Bandung serta melakukan pembuatan website kesehatan untuk sharing pengetahuan tentang kesehatan. Dengan beberapa aktivitas program yang telah dilakukan antara keduanya membuat kerja sama ini tergolong berhasil dikarenakan adanya beberapa kativitas kerja sama yang tetap berjalan dan tidak menutup kemungkinan program bidang kerja sama akan terus ditingkatkan bahkan membuat perluasan kerja sama dalam bidang lainnya untuk masa depan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kerja sama yang sudah di sepakati sebagaimana yang tercantum dalam piagam persahabatan atau yang lebih dikenal dengan istilah *MoU* dapat di jalankan dengan sebaik-baiknya sehingga kerja sama yang terjalin dapat berjalan lebih optimal serta mempererat hubungan dengan pihak luar bukan hanya sebatas tingkat daerah bahkan dapat membawa citra baik negara masing-masing.
2. Pemerintah kota selaku fasilitator yang tentunya memiliki peran yang cukup penting dalam hal ini sebagai penyelenggara seharusnya dapat berperan aktif

dalam menjalankan kerja sama yang terjalin selama 29 tahun lamanya. Tidak menutup kemungkinan potensi serta peluang yang besar bisa didapatkan melalui kerja sama *Sister City* ini mengingat tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengembangkan potensi kedua kota dan memperoleh keuntungan dari kerja sama yang dilakukan. Keuntungan yang didapatkan pun bisa dirasakan oleh semua *stake holder* yang terlibat didalamnya jika dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan benar. Selain itu, perlunya peran aktif masyarakat dalam kegiatan ini juga menjadikan pemerintah seharusnya mempublikasikan kegiatan kepada masyarakat kota baik itu individu ataupun kelompok. Selain itu, diperlukan pula tahap evaluasi dan monitoring terhadap kerja sama yang dilakukan agar program kegiatan dapat terimplementasikan dengan baik.

3. Hambatan-hambatan yang sudah terjadi selayaknya dapat dijadikan pengalaman berharga demi keutuhan sebuah hubungan kerja sama sehingga kedepannya program-program kegiatan lainnya bisa berjalan sebagaimana mestinya serta dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih baik kepada kedua belah pihak dan terus meningkatkan serta memperluas agenda program kegiatan kedepannya demi keuntungan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali Mukti, Takdir. 2010. *Paradiplomacy : Kerja Sama Luar Negeri oleh PEMDA di Indonesia*, Yogyakarta : The Phinis Press Yogyakarta.
- Adib Moghaddam, Arshin. 2006 *The International Politics of the Persian Gulf. A Cultural Genealogy*. London and New York: Routledge.
- Arikunto. 2010. *Suharsimi. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Criekemans, David. 2018 'Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?', University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium.
- D. Bailey, Kenneth. 1994, *Methods of Sosial Research*, New York: The Free Press, ana Syaodin Sukamadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda.
- Oetomo, Andi. *apa itu sister city ?* Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pembangunan Kebijakan Sekolah Arsitektur. Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Kebijakan Sekolah Arsitektur. Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
- Scholte, Jan Aart. 2000. *Globalization: A Critical Introduction* New York: Palgrave.
- Utama, Edi. 2013. *Perjalanan Anak Bangsa Menguasai Teknologi Dirgantara*, Bandung: PT Dirgantara Indonesia.

Sumber Dokumen/Website

- Bandung, Indonesia. Our Sister Cities. <http://www.fwsistercities.org/city/bandung-indonesia>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

Company of Bell Helicopter. diakses dari <http://www.bellhelicopter.com/company> pada tanggal 28 Juli 2019.

Cross Timbers and Prairies Ecological Region diakses dari http://tpwd.texas.gov/landwater/land/habitats/cross_timbers/ecoregions/cross_timbers.phtml pada tanggal 28 Juli 2019.

Dirgantara Indonesia Company Profile. <https://www.indonesian-aerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=company>. Di akses pada tanggal 27 juli 2019.

Fort Wort Sister Cities. *Bandung, Indonesia* diakses dari <http://www.fwsistercities.org/city/bandung-indonesia/> pada tanggal 28 Juli 2019.

John C. King, *Qualitative Research Method in International Affairs for Master Students*, diakses dari http://www.american.edu/sis/crs/upload.011SP-SIS-680-001_King.pdf, diakses pada 03 September 2019.

FortWortSisterCities. *Bandung, Indonesi* diakses dari <http://www.fwsistercities.org/city/bandung-indonesia/> diakses pada tanggal 16 mei 2019.

Fort Worth, Amerika Serikat. <http://bdg.ksln.co.id/kota-mou.php?link=fort-worth-texas-amerika-serikat> di akses pada tanggal 28 Juli 2019.

Fort Worth City. *About Fort Worth*. diakses dari <http://fortworthtexas.gov/about/> pada 28 Juli 2019.

Fort Worth Education and Research. diakses dari <http://www.city-data.com/us-cities/The->

Fort Worth Aviation & Aerospace diakses dari <https://www.fortworthchamber.com/eco/cluster-aviation.pdf> pada tanggal 28 Juli 2019.

Goals of Fort Wort Sister Cities. diakses dari <http://www.fwsistercities.org/about-us/> diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>.diakses pada tanggal 16 mei 2019.

https://www.indonesianaerospace.com/news/detail/171_pt+di+kerja+sama+dengan+bell+helicopter+textr diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

<https://www.e-ir.info/2019/07/29/examining-the-validity-of-a-global-britain-and-its-ties-with-the-commonwealth/> diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

<http://unfari.ac.id/assets/file/0296873acbbd7deda8b629c03fea1ce5.pdf> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/17028/L.%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp0eb2b9913full.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

<https://bandung.go.id/> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

<http://repository.unpas.ac.id/11615/4/Skripsi%20meh%20jadi%20Diplomat%20ka%20Korea%21%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10430/8304>, pada tanggal 20 Mei 2019.

<http://Sister City Kota Bandung.go.id> diakses pada tanggal 03 Mei 2019.

<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city> diakses pada tanggal 03 Mei 2019.

<http://www.twdb.texas.gov/surfacewater/rivers/reservoirs/worth/> pada tanggal 28 Juli 2019.

<http://www.city-data.com/us-cities/The-South/Fort-WorthGeographyand-Climate.html#ixzz4cE51UWOF> diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

<https://www.indonesian-aerospace.com/about/history> Sejarah PT. Dirgantara Indonesia. pdf. , diakses pada tanggal 07 Agustus 2019.

<http://fortworthtexas.gov/about/population/> pada tanggal 29 Juli 2019.

Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat,(2015).<https://jabar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/12> diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

Permendagri No. 193/1652/PUOD, Jakarta 26 april 1993.(dalam buku:Sid ik Jat mika, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional),BIGRAF PUBLISHING, Yogyakarta, 2000.

Profil Daerah Bandung. <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1060> di akses pada tanggal 28 Juli 2019.

Pemkot Bandung .(1991). *Bandung Selayang Pandang*.

Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung. *Prosedur Kerjasama*. Diakses dari <http://bdg.ksln.co.id/prosedur-sister-city.php> pada tanggal 28 Juli 2019.

Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri Kota Bandung, “*Sister City*”, diakses dari <http://bdg.ksln.co.id/sejarah.php> pada tanggal 2 Juli 2019.

Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung. *Struktur Organisasi Bagian Kerja Sama*.diakses dari <http://bdg.ksln.co.id/struktur-organisasi.php> pada tanggal 28 Juli 2019.

South/Fort-Worth-Education-and-Research.html pada tanggal 29 Juli 2019.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SETNEG, Tahun 2014

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, SETNEG, Tahun 1999.

Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar Diakses dar <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10430/8304>, pada tanggal 20 mei 2019.

Visi Dan Misi Kota Bandung.<https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRI7/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

Visi dan Misi Kota Bandung.<https://Website.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRI7/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

Website Resmi Institut Teknologi Bandung.[https://www2016.itb.ac. id/about-itb/](https://www2016.itb.ac.id/about-itb/)
diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

Wardiana,Wawan.http://eprints.rclis.org/6534/1/Wawan_Perkembangan_TI.pdf.
diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

**NASKAH KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA FORTH WORTH NEGARA BAGIAN TEXAS
TENTANG PERSAHABATAN DAN KERJASAMA KOTA**

TANGGAL 2 APRIL 1990

NASKAH KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT, REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KOTA FORT WORTH NEGARA BAGIAN TEXAS,
AMERIKA SERIKAT, TENTANG PERSAHABATAN DAN KERJA
SAMA KOTA

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Fort Worth, Negara Bagian Texas, Amerika Serikat (kemudian akan disebut sebagai pihak-pihak) ;

Berkeinginan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan Kerja Sama antara rakyat kedua kota, dan mengakui dengan memperhatikan pentingnya prinsip kesamaan serta saling menguntungkan,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak akan senantiasa meningkatkan persahabatan dan kerja sama, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam bidang-bidang berikut :

- a. Ekonomi, Perdagangan, Industri dan Kepariwisataaan;
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Administrasi;
- c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Naskah Kerja Sama ini, kedua belah pihak dapat melaksanakan persetujuan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam Naskah Kerja Sama ini.

Pasal 3

Kedua Belah Pihak akan selalu melakukan konsultasi apabila diperlukan mengenai pelaksanaan Naskah Kerja Sama ini.

Pasal 4

Sesuatu yang timbul sebagai akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan atas Naskah Kerja Sama ini, akan diatur secara baik melalui konsultasi atau pembicaraan antara kedua belah pihak.

Pasal 5

Pasal. 5

- a. Naskah Kerja sama ini akan berlaku sejak ditandatangani, dan akan berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan secara otomatis berlanjut untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali apabila terjadi keputusan secara tertulis oleh salah satu pihak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.
- b. Apabila Naskah Kerja Sama ini dihapuskan, persetujuan ini akan tetap berlanjut sampai pelaksanaan program-program kerja sama telah diselesaikan secara tuntas.

Untuk menguatkan Naskah Kerja Sama ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Pemerintah masing-masing.

Ditandatangani pada pukul *sebelum* Hari *Senin*
Tanggal *Dua April* tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dalam empat rangkap, dua masing-masing dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sedangkan semua naskah secara autentik adalah sama.

WALIKOTA Madya KEPALA DAERAH
SERKAT II BANDUNG
~~PROVINSI DAERAH TINGKAT I~~
JAWA BARAT
REPUBLIK INDONESIA

WALIKOTA FORT WORTH
NEGARA BAGIAN TEXAS
AMERIKA SERKAT

~~SAKENG WAHYUDI~~

GAREY GILLEY